

# Buletin BPIW • Sinergi

Media Informasi & Komunikasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR

KEMENTERIAN PUPR  
BADAN PENGEMBANGAN  
INFRASTRUKTUR WILAYAH



**Pengembangan Infrastruktur PUPR  
Melalui Kerja Sama dengan Negara Lain**

**Pengembangan Pulau-Pulau Kecil Terluar**



Edisi 11/November 2016

**Kerja Sama Dalam Percepatan Pembangunan**

[www.bpiw.pu.go.id](http://www.bpiw.pu.go.id)



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR  
WILAYAH (BPIW) KEMENTERIAN PUPR**

# **INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU UNTUK NEGERI**

**Gedung BPIW Lantai 1**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210

Email: [humasbpiw@gmail.com](mailto:humasbpiw@gmail.com)

Telp. +6221-7279 8112

 [www.bpiw.pu.go.id](http://www.bpiw.pu.go.id)

 [@informasiBPIW](https://twitter.com/informasiBPIW)

 [Layanan Informasi BPIW](#)

**Pelindung:**

Rido Matari Ichwan

**Penasehat:**

Dadang Rukmana

**Pengarah:**

Bobby Prabowo  
Harris H. Batubara  
Hadi Sucahyono  
Agusta Ersada Sinulingga

**Pemimpin Redaksi:**

P. Yudiantoro

**Redaktur Pelaksana:**

Shoviah

**Redaksi:**

M. Salahudin Rasyidi  
Mochammad Tranggono  
Hari Suharto Diyaksa  
Erwin Adhi Setyadhi  
Wahyu Hendrastomo  
Melva Eryani Marpaung

**Editor :**

Hendra Djamal

**Kontributor:**

Mutri Batul Aini  
Andina Dwiky  
Ichlasul Naufal  
Indira Dwi Kusumatuti  
Daris Anugrah

---

**Diterbitkan oleh:**

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah  
(BPIW) Kementerian PUPR

---

**Alamat Redaksi:**

Gedung G, BPIW Lantai 1  
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 11210  
Email: [humasbpiw@gmail.com](mailto:humasbpiw@gmail.com)  
Website: [www.bpiw.pu.go.id](http://www.bpiw.pu.go.id)  
Twitter: @InformasiBPIW  
Youtube: Layanan informasi BPIW  
No. Telp. +6221-2751 5804

---

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:  
[humasbpiw@gmail.com](mailto:humasbpiw@gmail.com)

---

Design : Heri Hito

**SALAM REDAKSI**

Pembaca yang budiman, pada Buletin Sinergi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) edisi bulan November ini, akan dikupas mengenai percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama pembiayaan. Tema itu diangkat dalam rubrik Kabar Utama.

Pada rubrik Wawancara, menghadirkan Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR, Ir. Bobby Prabowo, CES. Dalam rubrik ini dibicarakan mengenai program strategis yang telah dilakukan di 2016, dan yang akan dilakukan di tahun 2017.

Untuk laporan khusus dibahas mengenai pembangunan infrastruktur pulau terluar. Rubrik opini yang ditulis Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Ir. James Siahaan, MUM. Dalam opini ini dibahas seputar evaluasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR.

Pembaca juga dapat menikmati sajian informasi mengenai kegiatan BPIW sepanjang bulan November melalui rubrik Kilas BPIW. Selain itu ada rubrik Jalan-Jalan yang menampilkan Kawasan Nusa Penida, Bali. Kemudian dalam rubrik Tips kali ini dibahas cara menabung yang baik. Kemudian pada rubrik Glossary menampilkan istilah tentang investasi pembiayaan infrastruktur. Kami berharap apa yang disajikan dapat memperkaya wawasan pembaca.

Selamat membaca.



# daftar isi

Edisi 11 - November 2016



## 01 SALAM REDAKSI

## 02 DAFTAR ISI

## 03 PERSPEKTIF

Kerja Sama Dalam Percepatan Pembangunan

## 04 KABAR UTAMA

Pengembangan Infrastruktur PUPR Melalui Kerja Sama dengan Negara Lain

## 10 REVIEW

Profil Investasi Dalam Infrastruktur PUPR

## 11 GLOSSARY

Istilah Tentang Pembiayaan Infrastruktur

## 12 WAWANCARA

Perencanaan yang Dilakukan BPIW Fokus pada Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur

## 16 TEROPONG MEDIA

Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

## 18 KILAS BPIW

BPIW Akomodasi Masukan Pemerintah Desa Untuk Penyusunan *Masterplan* Kawasan Perdesaan Tabanan

## 42 LAPORAN KHUSUS

Pengembangan Pulau-Pulau Kecil Terluar

## 46 OPINI

Evaluasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PUPR

## 49 INFOGRAFIS

Modernisasi Jaringan Jalan Melalui Pembangunan Jalan Tol Serta Peran PT PII Dalam Penjaminannya

## 50 JALAN-JALAN

Indahnya Wisata Bahari di Pulau Nusa Penida

## 52 WPS Corner

Wilayah Pengembangan Strategis 15 & 16

## 54 TEKNOLOGI

Inovasi Skema Pembiayaan Infrastruktur

## 56 POTRET

Kegiatan Publikasi BPIW

## 58 TIPS

Tips Menabung Bagi Karyawan

## 59 TOKOH

Prof. Ir. Subriyer Nasir, MS., Ph.D Pengembangan Kawasan Sungai Musi, Perlu Didukung Kementerian PUPR

# Kerja Sama Dalam Percepatan Pembangunan

Indonesia terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kerja nyata untuk percepatan pembangunan infrastruktur tersebut bukan berarti tanpa tantangan, terutama terkait keterbatasan anggaran.

Untuk mengatasi tantangan anggaran, Kementerian PUPR melakukan beragam inovasi, seperti melakukan kerja sama dengan luar negeri, baik dengan negara serta lembaga pembiayaan, seperti World Bank.

Kerja sama luar negeri ini menjadi alternatif dalam mengatasi keterbatasan anggaran infrastruktur. Terbukti, berdasarkan rencana jangka menengah nasional (RJMN) 2015-2019, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen, investasi infrastruktur untuk periode 2015-2019 harus mencapai Rp 5.520 triliun. Adapun anggaran pemerintah pusat dan daerah hanya mampu menutup 50 persen dari total kebutuhan investasi.

Hingga akhir tahun 2016, Kementerian PUPR terus melakukan kerja sama dengan luar negeri. Hal ini untuk mensiasati keterbatasan anggaran dan penghematan pengeluaran negara.

Kerja sama terkini yang dilakukan Kementerian PUPR ini, adalah dengan Negara Belanda. Bertempat di Kantor Kementerian PUPR, 21 November lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan dengan Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda, Melanie Schultz van Haegen.

Pada pertemuan bilateral tersebut, kedua negara membahas sejumlah kerjasama yang telah terjalin sejak tahun 2001, khususnya di bidang sumber daya air (SDA).

Dalam melakukan percepatan pembangunan, pemerintah saat ini lebih fokus membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Berangkat dari amanat Nawacita tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan pulau-pulau terluar yang saat ini tercatat sebanyak 117 pulau

Keberadaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di tanah air jumlahnya memang banyak dan memiliki nilai strategis pada bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Lokasi PPKT pada umumnya terpencil dan jauh dari pusat kegiatan, sehingga mempunyai keterbatasan prasarana dan sarana seperti air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan, pasar serta informasi dan komunikasi.

Tingkat kesejahteraan masyarakat di PPKT juga, pada umumnya relatif rendah dan menimbulkan kesenjangan dengan masyarakat negara tetangga. Kesenjangan tersebut mendorong penduduk untuk berinteraksi dengan negara tetangga yang kondisinya lebih baik.

Untuk itu diperlukan untuk menterpadukan perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah, terutama infrastruktur PUPR di PPKT Indonesia. Hal itu bertujuan untuk menyiapkan dokumen pendukung berupa profil WPS 35 untuk bahan rencana pembangunan infrastruktur terpadu antar sektor dan antar wilayah sebagai acuan pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan infrastruktur terpadu di Indonesia.

Pada prinsipnya pembangunan pulau-pulau kecil terluar dilakukan untuk, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan.

Disamping itu juga mengamankan potensi sumber daya alam untuk dimanfaatkan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan tentunya memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Bagi Kementerian PUPR, pembangunan pulau terluar dilakukan dengan membangun infrastruktur dasar bagi para penduduk yang tinggal di pulau tersebut, seperti infrastruktur perumahan dan permukiman berupa jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi.\*\*)



# Pengembangan Infrastruktur PUPR Melalui Kerja Sama dengan Negara Lain

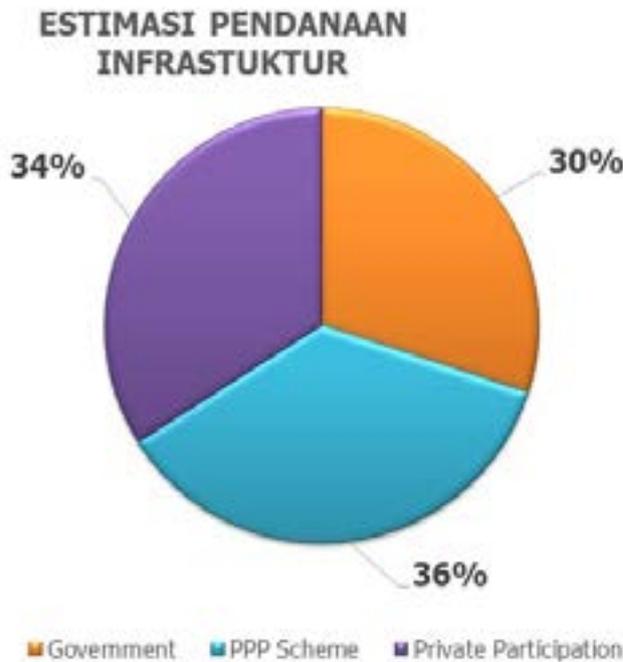


Menteri PUPR melakukan pertemuan dengan delegasi Belanda menajaki kerja sama Infrastruktur

Sumber: Dok. BPIW

Indonesia terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun pembangunan infrastruktur tersebut dihadapkan pada beberapa tantangan, salah satunya keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi hal itu, Kementerian PUPR melakukan kerja sama dengan beberapa skema, seperti kerja sama dengan negara lain, lembaga donor luar negeri, dan badan usaha. Setidaknya dalam kurun waktu 2015 - 2016, Kementerian PUPR sudah melakukan beberapa kali pertemuan dan menjalin kerja sama dengan beberapa pihak, seperti Republik Kepulauan Fiji, Belanda, dan World Bank. Kerja sama yang dilakukan menyangkut beberapa hal, seperti masalah air dan dukungan terhadap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kerja sama infrastruktur PUPR tersebut diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## ESTIMASI KEBUTUHAN PENDANAAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2015 – 2019



Berdasarkan estimasi kebutuhan pendanaan infrastruktur 2015 – 2019, Pemerintah hanya mampu memenuhi 30% dari total kebutuhan dana, sekitar 1.433 Triliun dari total 4.779 Triliun. Hampir 36% dari selisih pendanaan di penuhi skema PPP. Sementara pihak swasta diharapkan dapat memenuhi selisih pendanaan, serta dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pembangunan, pelaksanaan, dan pengelolaan layanan infrastruktur yang berkualitas

Source: Public Private Partnerships – Infrastructure Projects Plan in Indonesia 2013 (Ministry of National Development Planning)

Hingga akhir tahun 2016, Kementerian PUPR terus melakukan kerja sama dengan pihak ketiga melalui berbagai pihak. Hal ini untuk mensiasati keterbatasan anggaran dan penghematan pengeluaran negara. Kerja sama terkini yang dilakukan Kementerian PUPR ini, adalah dengan Negara Belanda. Bertempat di Kantor Kementerian PUPR, 21 November lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan dengan Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda, Melanie Schultz van Haegen.

Pada pertemuan bilateral tersebut, kedua negara membahas sejumlah kerja sama yang telah terjalin sejak tahun 2001, khususnya di bidang sumber daya air (SDA). Dalam pertemuan itu, Melanie yang didampingi sejumlah pejabat negaranya, dan perwakilan dari Kedutaan Besar Belanda di Indonesia, menyampaikan apresiasinya atas peran serta aktif Indonesia di dunia internasional dalam bidang sumber

daya air. "Kita semua menghadapi masalah air ini dan kita perlu mengatasi masalah tersebut bersama-sama," ujar Melanie. Kerja sama Indonesia-Belanda di bidang

**Hingga akhir tahun 2016, Kementerian PUPR terus melakukan kerja sama dengan pihak ketiga melalui berbagai pihak. Hal ini untuk mensiasati keterbatasan anggaran dan penghematan pengeluaran negara.**

SDA telah memasuki fase keempat dengan periode tahun 2015-2019. Fase pertama berlangsung pada tahun 2001-2006, kedua pada 2007-2012, dan ketiga pada 2012-2015. Pada fase keempat ini, terdapat beberapa kegiatan yang dikoordinasikan melalui kelompok kerja, antara lain menyangkut

pengelolaan sumber daya air terintegrasi, air untuk pangan dan ekosistem, serta ketersediaan air dan sanitasi.

Nota kesepahaman fase IV telah ditandatangani oleh Menteri PUPR RI dan Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda pada 14 April 2015, serta oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI pada 11 Mei 2015.

Salah satu kegiatan prioritas yang dibahas dalam pertemuan ini adalah *National Capital Integrated Coastal Management* (NCICM) yang ditujukan untuk perlindungan wilayah pesisir Jakarta, sanitasi dan suplai air, peningkatan konektivitas, komunitas perkotaan berkelanjutan dan pengembangan kawasan.

Menteri Basuki yang didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda I, Gusti Agung Wesaka Puja serta jajaran pejabat eselon I Kementerian PUPR menjelaskan perkembangan terakhir terkait NCICM, bahwa melalui rapat kabinet pada April 2016

diputuskan agar proyek ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi. "NCICD bukan hanya proyek penanggulangan banjir, melainkan pemulihan lingkungan hidup secara keseluruhan," tegas Basuki.

Sebagai konsekuensinya, cakupan proyek NCICD menjadi lebih luas dengan mengintegrasikan daerah hulu, hilir, dan pesisir. "Akan ada instansi yang akan dibentuk di bawah Kementerian PUPR untuk menangani proyek ini secara khusus mulai tahun 2017," ucap Basuki.

Menteri Melanie menyatakan langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam pengelolaan pesisir harus mempertimbangkan kenaikan muka air laut yang telah menjadi isu global. "Karena itu langkah jangka pendek perlu dibarengi dengan penyusunan rencana aksi jangka panjang yang adaptif," ujarnya. Ia juga menyinggung pentingnya pelibatan publik dalam kegiatan pembangunan.

Pertemuan itu akan ditindaklanjuti dengan kunjungan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte untuk mengunjungi sejumlah lokasi

*pilot project* hasil kerjasama Indonesia-Belanda di Semarang, Jawa Tengah. Lokasi yang dipilih adalah Polder Banger, Kota Tua Semarang, dan proyek pengamanan pantai *Building with Nature* Demak.

Empat hari sebelumnya atau tepatnya 18 November lalu, Kementerian PUPR melalui

## Pertemuan itu akan ditindaklanjuti dengan kunjungan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte untuk mengunjungi sejumlah lokasi pilot project hasil kerjasama Indonesia-Belanda di Semarang, Jawa Tengah.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR juga melakukan pertemuan dengan pihak luar negeri, yakni dengan Perancis. Dalam pertemuan itu BPIW dipimpin Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan dan didampingi Sekretaris BPIW, Dadang

Rukmana. Sedangkan rombongan dari Perancis, diwakili *Green Building* Perancis yang dipimpin, Franck Miraux.

Pertemuan itu membahas kelanjutan atau perpanjangan kerja sama kedua belah pihak. Salah satunya kerja sama yang akan dilanjutkan itu yakni mengenai pengembangan *Eco District* dalam mewujudkan Kota Cerdas Berkelanjutan di Indonesia. "Dalam melakukan penataan kota menuju Kota Cerdas Berkelanjutan memang membutuhkan kemitraan dengan banyak pihak. Termasuk, kemitraan dengan lembaga internasional serta negara sahabat," kata Rido.

Menurut Rido, BPIW senantiasa membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak dalam mengembangkan kota-kota di Indonesia, sehingga kondisi kota-kota yang ada dapat semakin baik pada masa mendatang. Membangun kota, lanjut Rido, membutuhkan perencanaan, konsepsi, proses waktu yang tak singkat serta biaya yang tak murah.

"Terciptanya kemitraan dengan berbagai

## PENGAMANAN PANTAI DI JAKARTA

### MASTERPLAN NCICD



3

## Lingkungan Cerdas Berkelanjutan

### SMART ENERGY



**Smart Grid**

**Ketersediaan sumber daya air  
Pemanfaatan sumber daya terbarukan**



**Infrastruktur Sumber Daya air yang mendukung Energi Berkelanjutan melalui hydropower di Waduk Cirata**



**Pengembangan perkebunan sawit untuk energi terbarukan di kawasan perkotaan**



**Smart lighting di beberapa ruang publik**

lembaga yang relevan menjadi semacam keharusan, agar dalam mengembangkan kota-kota di Indonesia dapat semakin mudah dan terwujud dalam waktu yang lebih cepat,” tutur Rido. Pada kesempatan itu, Dadang mengatakan, saat ini Perancis merupakan salah satu negara maju yang patut diajak bekerja sama dalam pengembangan kota-kota di Indonesia. “Banyak hal yang perlu diadopsi dan dipelajari dari kota-kota di Perancis, seperti terkait suplai energi listrik yang dilakukan secara mandiri dengan memanfaatkan potensi energi yang ada, mulai dari biomassa, tenaga matahari, pengolahan sampah dan lainnya,” tambah Dadang.

Franck Miraux mengatakan saat ini kerja sama yang telah dilakukan baru untuk dua kota, yakni Bandung dan Mataram. Menurutnya, Perancis dalam kerja sama pengembangan kota selalu memomorsatukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) penghuni kota dengan menyesuaikan karakter dan nilai-nilai yang

hidup di daerahnya.

Seperti diketahui, Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR pada 2016 melakukan

“Terciptanya kemitraan dengan berbagai lembaga yang relevan menjadi semacam keharusan, agar dalam mengembangkan kota-kota di Indonesia dapat semakin mudah dan terwujud dalam waktu yang lebih cepat,” tutur Rido.

pendampingan terhadap delapan kota untuk melakukan percepatan pengembangan Kota Cerdas Berkelanjutan.

Delapan kota itu mewakili Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kawasan timur dan Jawa, yakni Banda Aceh, Padang, Banjarmasin, Gorontalo, Bau-bau, Ambon, Salatiga, Trenggalek. Diharapkan

pengembangan kota tersebut dapat dilakukan kerja sama dengan Perancis.

BPIW Kementerian PUPR juga menjajaki peluang kerja sama dengan Denmark. Terlebih, saat ini BPIW sedang mengembangkan perencanaan dan pemrograman pembangunan kawasan perkotaan yang berbasis teknologi. “Teknologi itu untuk memudahkan dalam mengintegrasikan ide-ide pengembangan infrastruktur kawasan perkotaan,” ungkap Rido saat menerima kunjungan Kedutaan Denmark dan Ramboll sebagai kontributor arsitektur *landscape* di kantor BPIW, 11 November lalu. Rido mengatakan

Kementerian PUPR pernah melakukan kerja sama dalam mengembangkan kawasan perkotaan dengan Norwegia dan Kementerian Lingkungan Hidup melalui G2G *Cooperation*.

“Dengan kerja sama seperti ini, kami berharap akan bisa diaplikasikan kembali dalam beberapa rencana pengembangan

## PEMBANGUNAN TOL TRANS SUMATERA SEKSI MEDAN – KUALANAMU – TEBING TINGGI (PSN)

<b>Total Panjang Jalan</b>	: 61,70 Km
Biaya Investasi (Investor)	: Rp 4,072 T
Biaya Pembebasan Lahan	: Rp 441 M
APBN konstruksi	: Rp 1,759 T
Progres Pembangunan	: 85,96%
Target Operasi	: 2017



Kualanamu Interchange

Sumber: Dok. BPIW

kawasan perkotaan, seperti saat ini Kementerian PUPR sedang mengembangkan 10 Kota Baru di Indonesia,” tutur Rido. Ia juga menghimbau Ramboll untuk melakukan kunjungan ke pemerintah daerah untuk mempresentasikan konsep *Green-Blue Infrastructure*, agar dapat diaplikasikan di masing-masing daerah yang membutuhkan solusi pencegahan banjir di kawasan perkotaan tersebut. Pada kesempatan tersebut, *Head of Trade of Royal Danish Embassy, Dorthea Damkjaer* mengatakan, saat ini Copenhagen sedang mengembangkan pengembangan kawasan perkotaan yang berbasis *Green-Blue Infrastructure*. Menurutnya, *Green-Blue Infrastructure* efektif untuk diaplikasikan dalam perkotaan yang memiliki permasalahan dalam sistem pengairan saat musim hujan.

“Hujan di Copenhagen bisa berlangsung selama 2 jam berturut-turut, maka dari itu dibutuhkan suatu pengembangan kawasan tepi sungai untuk mencegah terjadinya banjir,” tutur Dorthea. Di tempat yang sama, *Managing Director of Ramboll, Leonard Ng* menerangkan konsep *Green-Blue Infrastructure* merupakan konsep pengembangan kawasan perkotaan yang

mengedepankan keseimbangan antara aktivitas manusia dengan lingkungan hidup. “Seperti ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan peningkatan kualitas kawasan tepi sungai di perkotaan,” paparnya. Menurutnya, konsep *Green-Blue Infrastructure* cocok untuk diterapkan di

**KERJA SAMA JUGA DILAKUKAN DENGAN World Bank, terutama dalam pengembangan kawasan pariwisata. Kementerian PUPR merupakan salah satu dari 10 kementerian dan lembaga di Indonesia yang bekerja sama dengan organisasi internasional tersebut.**

beberapa kawasan perkotaan di Indonesia yang memiliki karakteristik dilewati sungai dan berpotensi terjadi banjir jika mengalami hujan. Menurut Leonard, pihaknya telah dua kali membantu dalam mengembangkan kawasan perkotaan di Jakarta seperti saat pembangunan Waduk Ria Rio di Pluit, Jakarta Utara dan rencana pengembangan kawasan Monas menjadi Monas Merdeka *Square* yang digadang-gadang akan menjadi alun-alun

kota terbesar kedua di dunia.

Kerjasama juga dilakukan dengan World Bank, terutama dalam pengembangan kawasan pariwisata. Kementerian PUPR merupakan salah satu dari 10 kementerian dan lembaga di Indonesia yang bekerja sama dengan organisasi internasional tersebut. Kementerian dan lembaga yang terlibat tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Koordinasi Penanaman Modal, PT. Indonesia *Tourism Development Corporation* (ITDC), dan Kementerian PUPR.

Pada 8-21 Juni lalu, World Bank telah melaksanakan *Pre Appraisal Mission*. Kegiatan ini menghasilkan beberapa hal. Pertama, pemerintah Indonesia melalui masing-masing kementerian dan lembaga terkait, telah membuat *development plan*, misalnya Kementerian Pariwisata membuat *development plan* untuk 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN),



Kepala BPIW bertemu dengan delegasi Greend Building Prancis untuk membicarakan peluang kerja sama Kota Cerdas Berkelanjutan

Sumber: Dok. BPIW

Kementerian PUPR membuat development plan dan TOR *basic services* di 10 KSPN, Kemenko Maritim sedang membuat rencana aksi Danau Toba.

Kerja sama juga dilakukan Indonesia dengan Timor Leste. Berdasarkan SK Menteri No.297/KPTS/M/2016. Kerja sama yang akan dilakukan pertama, Identifikasi kota-kota yang membutuhkan bantuan teknis penyusunan masterplan dan pendampingan penyusunan masterplan untuk kota-kota terpilih.

Indonesia juga telah melakukan *memorandum of understanding* (MOU) atau nota kesepahaman dengan Negara Kepulauan Fiji mengenai pengembangan kota dan perumahan. Jangka waktu kesepakatan tersebut 18 Juni 2014 sampai 18 Juni 2017. Kesepakatan itu diperpanjang secara otomatis selama 3 tahun kecuali salah satu pihak mengirimkan surat pemutusan 3 bulan sebelum masa berlaku habis.

Bentuk kerja sama adalah pertama, pertukaran Informasi, pengetahuan teknis dan pengalaman professional. Kedua, pertukaran dan penugasan Senior Officer dan / atau Ahli. Ketiga, pelaksanaan program pelatihan. Keempat, penyelenggaraan rapat, simposium, dan Lokakarya. Kelima, penelitian dan pengembangan. Keenam, endorng dan memfasilitasi hubungan sistership. Ketujuh, pengembangan kelembagaan proyek percontohan.

Kerja sama dengan pihak ketiga ini, dilandasi

aturan hukum yang jelas dan cukup memadai. Beberapa landasan kerja sama pengembangan infrastruktur, pertama, Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dalam aturan tersebut terdapat *sharing* pengendalian dan evaluasi pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah.

Kedua, Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015

menteri tersebut, terutama pada bagian 3.2. mengenai arah kebijakan dan strategi pembangunan PUPR disebutkan bahwa, pembangunan wilayah perlu didukung kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan melibatkan pihak swasta.

Menjalinkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pihak luar negeri, perlu dilakukan untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Keterbatasan kemampuan fiskal negara

itu bukanlah berarti pembangunan infrastruktur menjadi mandeg. Para *stakeholders* perlu duduk bersama agar dapat memikirkan langkah-langkah terobosan yang dapat meminimalkan terbatasnya pembiayaan infrastruktur dan mensinergikan program-program pembangunan di kawasan-kawasan prioritas.

Pemerintah daerah, memiliki banyak gagasan kerja sama untuk pembangunan infrastruktur. Salah satunya program penyediaan air

minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau pamsimas. Dengan program tersebut, masyarakat dilibatkan untuk menyediakan air minum dan sanitasi yang baik. Segala terobosan dan inovasi untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak harus dilakukan, agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan maksimal. **Tim Redaksi**

**Kerja sama dengan pihak ketiga ini, dilandasi aturan hukum yang jelas dan cukup memadai. Beberapa landasan kerja sama pengembangan infrastruktur, pertama, Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.**

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Ketiga, Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Berlandaskan aturan itu, maka kemitraan dalam pengembangan infrastruktur dilakukan oleh pemerintah dengan badan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Ketiga, Peraturan Menteri PUPR No. 13/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis PUPR 2015-2019. Dalam peraturan

Sumber: Dok. PUPR



Judul Buku : Profil Investasi Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum 2014  
 Penerbit : Pusat Kajian Strategis Kementerian Pekerjaan Umum  
 Tahun Terbit : 2014  
 Jumlah halaman : 139 halaman

## Profil Investasi Dalam Infrastruktur PUPR

Untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai, investasi infrastruktur yang besar mutlak diperlukan. Namun, pola-pola investasi dalam pembangunan infrastruktur hingga saat ini dirasakan belum optimal dan belum dapat memenuhi gap kebutuhan infrastruktur. Dengan keterbatasan dana (*budget constrain*) pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur, alternatif pola investasi perlu terus menerus dicari dan dikembangkan melalui pelibatan BUMN/BUMD, pihak swasta, dan masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana investasi infrastruktur, khususnya infrastruktur bidang PU, telah terlaksana dan sejauh mana institusi non pemerintah telah berpartisipasi dalam pembiayaan infrastruktur, diperlukan suatu evaluasi yang kontinyu. Buku ini adalah salah satu cara untuk menggambarkan sejauh mana pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta telah terlibat dalam pendanaan infrastruktur. Pembahasan didalamnya memuat peta pembiayaan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum yang bersumber dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum, APBD Provinsi, dan dari swasta melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) di setiap provinsi di Indonesia, juga isu-isu strategis investasi yang perlu mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan. Data-data dalam buku profil ini menjadi peta awal progres pelaksanaan pendanaan infrastruktur bidang PU, yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses analisa investasi infrastruktur lebih lanjut untuk merumuskan alternatif pola investasi infrastruktur bidang PU.

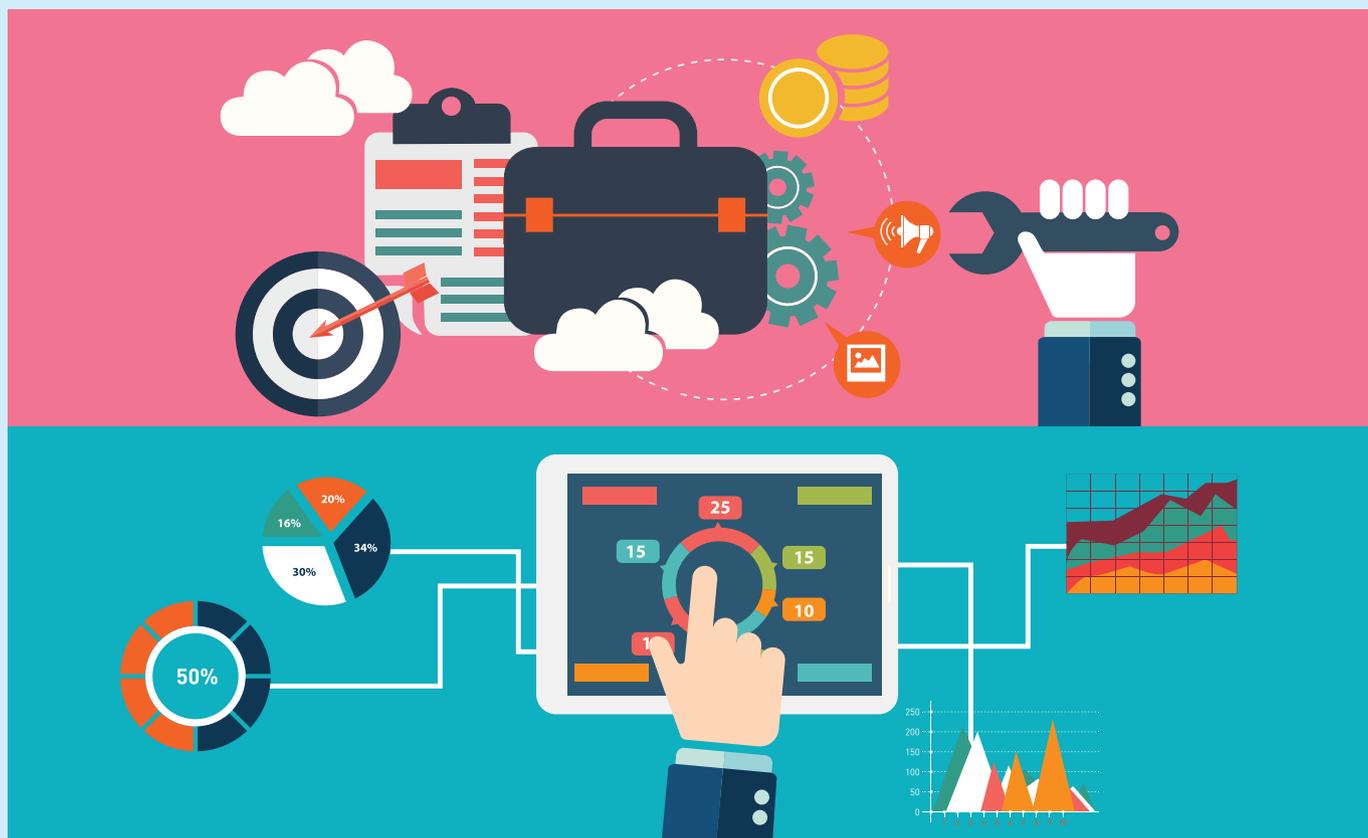
**Data-data yang ditampilkan dalam buku ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu:**

1. Data alokasi investasi yang bersumber dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum diperoleh dari hasil e-monitoring Kementerian Pekerjaan Umum,
2. Data investasi yang bersumber dari DAK diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan,
3. Data investasi yang bersumber dari APBD Provinsi diperoleh dari buku APBD masing-masing provinsi yang merupakan inventaris Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan,
4. Data investasi yang bersumber dari swasta melalui skema KPS diperoleh dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam proses penyusunannya, data-data tersebut selanjutnya disesuaikan dengan data yang diperoleh dari hasil kunjungan langsung ke daerah.

Adapun isi buku ini didahului dengan pembahasan mengenai permasalahan dan tantangan dalam menyelenggarakan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum. Setelah itu, dipaparkan kondisi actual infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dari masing-masing sektor (Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Cipta Karya). Setelah itu, baru masuk ke pembahasan profil investasi bidang pekerjaan umum yang disusun berdasarkan asal alokasi dana. Tidak ketinggalan juga disajikan beberapa pencapaian investasi bidang Pekerjaan Umum dalam mendukung MP3EI.

“Buku ini adalah salah satu cara untuk menggambarkan sejauh mana pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta telah terlibat dalam pendanaan infrastruktur.”



## Istilah Tentang Pembiayaan Infrastruktur

**Dana Alokasi Khusus (DAK):** merupakan dana Inpres (Instruksi Presiden) yang dikembangkan di masa pemerintahan orde baru. DAK termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Namun dalam pemanfaatannya, pemerintah daerah harus mengikuti berbagai regulasi pusat, seperti undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), keputusan presiden, peraturan/keputusan menteri, surat edaran direktur jenderal, dan surat edaran kementerian yang memperoleh alokasi DAK. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan khusus di dan oleh daerah. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber dayanya. Infrastruktur merupakan salah satu bidang penerima DAK terbesar selain pendidikan dan kesehatan.

**Investasi:** penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.

**Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU):** adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum

dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

**Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment):** adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.

**Project Development Facility (PDF):** adalah fasilitas yang disediakan oleh kementerian keuangan untuk membantu penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) menyusun kajian prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJPK dalam transaksi proyek KPBU hingga mencapai pembiayaan dari lembaga pembiayaan (*financial dose*).

**Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR):** adalah Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan

guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

**Viability Gap Fund (VGF):** adalah Dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai pada proyek KPBU yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial. Dukungan Kelayakan dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat proyek Kerjasama layak secara finansial. Pemerintah Daerah dapat berkontribusi atas pemberian dukungan ini setelah memperoleh persetujuan dari DPRD.

### Referensi:

1. Buku Profil Investasi Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2014
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
4. Koran Kompas Edisi tanggal 14 November 2016 Halaman 17
5. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas



## Perencanaan yang Dilakukan BPIW Fokus pada Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur

**Ir. Bobby Prabowo, CES**

*Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian PUPR*

Pemerintah terus memacu pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air. Untuk itu diperlukan perencanaan infrastruktur yang dapat memaksimalkan potensi yang dapat dikembangkan. Sebagai 'nakhoda baru' yang menjabat sebagai Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW Kementerian, Ir. Bobby Prabowo, CES menyadari betapa pentingnya peran unit organisasinya untuk melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur

yang berbasis pengembangan wilayah. Apalagi tahun 2017 sudah dekat. Artinya perencanaan infrastruktur yang sudah ada, dapat disiapkan untuk direalisasikan dengan anggaran yang ada. Seperti apa pandangan Bobby Prabowo mengenai berbagai macam hal terkait perencanaan itu?. Berikut petikan lengkap wawancaranya dengan tim Buletin Sinergi di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

**Saat pertama kali menjabat sebagai Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, menurut pandangan Bapak, seperti apa perencanaan infrastruktur PUPR agar dapat hasil yang maksimal?**

Menurut kami, perencanaan infrastruktur PUPR bukan hayalan, artinya perencanaan yang dilakukan konkrit dan jelas serta terukur sehingga bisa diimplementasikan secara bertahap, dalam arti sesuai dengan urgensi atau skala prioritas sehingga bisa memberikan manfaat yang terbesar atau efek pareto. Bertahap dalam arti, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Perencanaan itu juga inklusif dalam prosesnya sehingga semua pihak yang terkait dengan implementasi perencanaan mempunyai “*sense of belonging*” sehingga tumbuh komitmen yang kuat untuk sama-sama mewujudkan rencana tersebut. Perencanaan dilakukan terpadu dengan berbagai pihak yang membutuhkan dukungan infrastruktur PUPR untuk meningkatkan konektivitas, ketahanan air, kedaulatan pangan, ketahanan energi, peningkatan kualitas hidup, mendukung keseimbangan pembangunan dan lain-lain. Kemudian terpadu dengan rencana pemerintah daerah provinsi dan kabupaten maupun kota, terpadu dengan perencanaan yang dilakukan oleh dunia usaha, kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi yang terjadi atau *market driven*. Perlu upaya maksimal untuk mencapai keterpaduan yang dilakukan berbasis pengembangan wilayah.

**Sebelum di BPIW, di mana Bapak bekerja?**

Sebelum di BPIW, saya bekerja di Balitbang Kementerian PUPR. Saya bekerja di sana selama 1 tahun, tapi sebenarnya saya lama berkecimpung di Ditjen Sumber Daya Air atau SDA. Pertama kali masuk di Departemen PU, saya bekerja di Direktorat Bina Program Pengairan. Waktu itu saya bergabung di Subdit Evaluasi Kinerja. Subdit ini mengurus pinjaman luar negeri. Saya banyak bekerja di manajemen proyek infrastruktur. Jadi proyek dilakukan dari sejak awal, yakni perencanaan sampai proyek selesai dilakukan. Sebagai orang yang bertugas di evaluasi proyek, saya melakukan monitoring pelaksanaan proyek. Alhamdulillah saya selama ini dapat bekerja dengan baik, karena banyak senior yang memberikan bimbingan ke saya.

**Seperti apa pula program perencanaan infrastruktur yang akan diprioritaskan untuk diselesaikan hingga akhir tahun ini?**

Beberapa kegiatan yang kami prioritaskan bisa dituntaskan tahun ini, yakni pertama, penyelesaian dokumen *Review Renstra 2015-2019*. *Review* dilaksanakan untuk mempertajam sasaran *output* program-program, terutama dalam rangka meningkatkan keterpaduan, perkembangan atau dinamika yang terjadi, termasuk kebijakan prioritas Bapak Presiden yang disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Kedua, sesuai arahan Bapak Kepala BPIW, kami juga akan

menyebarkan semua dokumen *masterplan* dan *development plan* yang sudah disusun sejak tahun 2015, agar dapat menjadi panduan awal unit organisasi dalam implementasi pembangunan infrastruktur PUPR. Meskipun kami sadar dokumen tersebut jauh dari sempurna. Dokumen perencanaan keterpaduan infrastruktur PUPR yang saat ini sedang disusun dan difinalisasi diantaranya *masterplan 2025* dan *development plan 2015-2019* seluruh pulau/keulauan di Indonesia, serta rencana pengembangan kawasan strategis dan kawasan perkotaan.

Ketiga, rekomendasi program pengembangan infrastruktur PUPR tahun 2018 – 2019 yang terpadu sebagai masukan untuk konsultasi regional atau kongreg tahun anggaran 2017. Keempat, pengembangan indikator – indikator kinerja utama atau *key performance index* keterpaduan perencanaan. Dalam waktu dekat, kami akan mengumpulkan para pakar untuk mendiskusikan hal ini.

**Bagaimana koordinasi BPIW dengan unit organisasi atau unor di lingkungan Kementerian PUPR dalam penyusunan perencanaan infrastruktur ?**

Koordinasi dengan unor di PUPR merupakan tantangan tersendiri yang harus dilakukan oleh BPIW, apalagi keterpaduan perencanaan infrastruktur

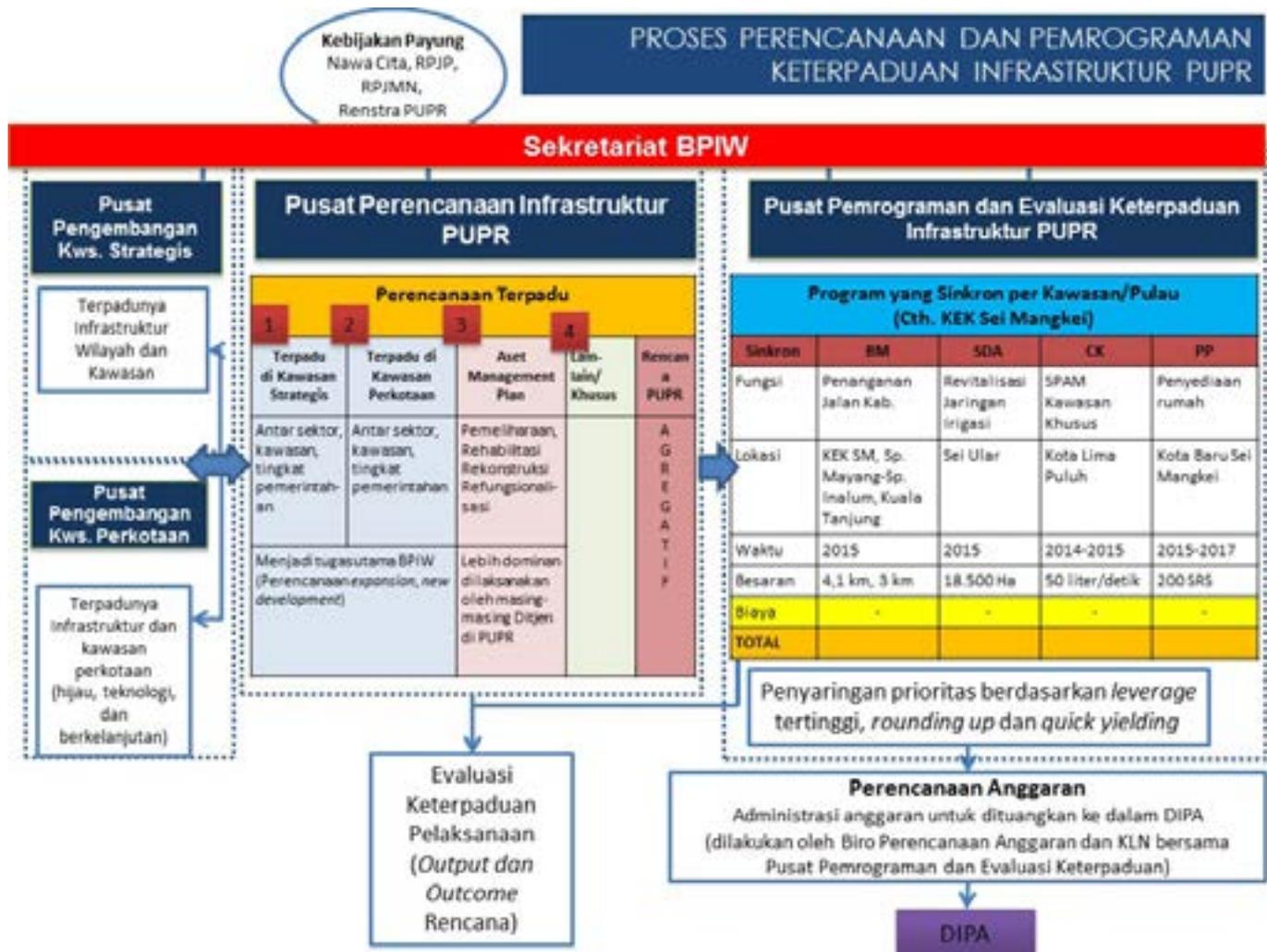
sebagai salah satu esensi keberadaan BPIW sebagai unor baru di lingkungan Kementerian PUPR adalah adanya koordinasi yang intensif. Agar koordinasi dengan unor bisa berjalan dengan efektif dalam perencanaan infrastruktur, ada beberapa upaya yang akan kami lakukan, yakni memastikan agar perencanaan infrastruktur PUPR yang dilaksanakan BPIW bisa sinergi dan bernilai tambah serta tidak terkesan mengambil kewenangan perencanaan infrastruktur yang selama ini sudah dilaksanakan di masing – masing unor.

Kami juga harus memastikan agar perencanaan infrastruktur yang dilaksanakan BPIW fokus pada pengembangan kapasitas infrastruktur PUPR (*capital expansion*) skala besar dan memiliki dampak dan atau *outcome* besar terhadap pencapaian target pemerintah, seperti penguatan daya siang, peningkatan produktifitas, dan dukungan pada pencapaian program prioritas nasional, seperti pariwisata dan kedaulatan pangan.

Selain itu kami harus memastikan agar perencanaan infrastruktur PUPR yang dilaksanakan BPIW fokus pada pengembangan infrastruktur terpadu. Sekali lagi, indikator kunci keterpaduan menjadi hal penting yang harus didefinisikan dan disepakati bersama.

**Tantangan apa yang dihadapi dalam melaksanakan perencanaan infrastruktur?**

Selain tantangan yang bersifat substansial, kami dihadapkan pada tantangan yang bersifat praktikal dalam perencanaan infrastruktur, terutama akurasi dan ketersediaan data kondisi eksisting sebagai *baseline* di dalam memprediksi kebutuhan infrastruktur PUPR jangka panjang yang realistis dan bisa dilaksanakan. Itu tantangan pertama. Tantangan keduanya adalah keterlibatan *stakeholder* utama secara inklusif dalam proses perencanaan infrastruktur agar perencanaan



yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata. Misalkan dalam konteks dukungan infrastruktur PUPR pada program prioritas pariwisata nasional. BPIW seyogyanya intensif berkomunikasi dengan pelaku utama industri pariwisata nasional. Ketiga, dukungan para ahli dan mitra kerja yang mumpuni. Keempat, ketersediaan pembiayaan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur yang selalu lebih rendah dibandingkan kebutuhan.

#### Seperti apa solusi dalam menghadapi tantangan tersebut?

Ada beberapa solusi yang sedang kami upayakan untuk menghadapi tantangan itu. Mengenai akurasi data untuk basis perencanaan, kami tentu akan mendorong unit terkait di internal PUPR seperti Pusdata untuk lebih aktif menginventarisasi informasi dan data terkait kondisi eksisting infrastruktur PUPR. Teknologi komunikasi dan informasi sudah sangat berkembang. Adopsi teknologi informasi menjadi hal yang tidak bisa dihindari.

Terkait pariwisata nasional, kami bersama pusat pengembangan kawasan strategis akan mengawal pelaksanaan program pengembangan infrastruktur PUPR pada tiga destinasi pariwisata prioritas DPP, yakni Danau Toba, Mandalika dan Borobudur

Mengenai akurasi perencanaan infrastruktur PUPR, kami akan mendorong adopsi modelling berbasis sistem yang bersifat dinamis sebagai peranti perencanaan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Kami juga akan membangun kekerabatan, koordinasi dan

komunikasi yang intensif dengan para *stakeholder* kunci agar bisa mengetahui apa yang benar – benar mereka perlukan. Kemudian untuk dukungan *expertise* tertentu kami juga akan bekerja sama dengan unit litbang, perguruan tinggi dan para pakar-pakar lainnya yang saya kira pasti ada dan memang harus dicari. Jika perlu, kita datangkan *expertise* asing

untuk membantu mendampingi BPIW.

Terkait tantangan *funding gap*, kami akan memilah dengan seksama infrastruktur PUPR untuk mengetahui infrastruktur sebagai *public goods and services* yang benar – benar domain dan tanggung jawab pemerintah dan mana infrastruktur yang masuk kategori *private*

goods yang memiliki potensi *cost recovery*, sehingga bisa ditawarkan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha.

Dengan demikian, pemerintah melalui pendanaan APBN dan APBD dapat berfokus pada pengembangan infrastruktur PUPR di kawasan yang belum berkembang sedangkan badan usaha pemerintah dan badan usaha swasta dapat berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur PUPR di kawasan yang sudah maju/berkembang dimana sudah terdapat pengembalian investasi.

#### **Pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah apakah menjadi patokan dalam membuat perencanaan ?**

Iya benar, perencanaan infrastruktur PUPR dilaksanakan berbasiskan pengembangan wilayah. Sebagaimana telah dimaklumi, pada tahun 2015 – 2019, Renstra PUPR mengamanahkan bahwa fokus pengembangan infrastruktur PUPR dalam lima tahun ke depan akan diprioritaskan pada 35 wilayah pengembangan strategis atau WPS. Namun demikian, pemerintah tentu juga wajib memastikan bahwa seluruh wilayah nasional terpenuhi pelayanan infrastruktur PUPR, baik dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar atau basis *services* maupun dalam rangka mendorong potensi ekonomi wilayah.

#### **Apa saja program perencanaan yang akan dilakukan tahun depan?**

Program perencanaan infrastruktur PUPR tahun depan tetap difokuskan pada, pertama, program – program yang mendukung pencapaian nawacita terutama pada aspek membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kedua, program – program yang mendukung sasaran pembangunan dalam RPJMN 2015 – 2019, yang meliputi penguatan konektivitas, pencapaian visi kedaulatan pangan, air dan energi, serta peningkatan kualitas hidup.

Ketiga, program – program jangka panjang yang merupakan arahan bagi pembangunan infrastruktur PUPR prioritas yang tertuang dalam Renstra Kementerian PUPR hingga tahun 2019. Program – program tersebut diharapkan dapat mengutamakan keterpaduan baik pada

lintas sektor dan tingkat pemerintahan sehingga program – program yang terimplementasi nantinya dapat terintegrasi dan tepat sasaran.

#### **Apa yang menjadi prioritas perencanaan tahun depan terutama terkait program prioritas nasional seperti mendukung pariwisata nasional dan kawasan perbatasan?**

Terkait pariwisata nasional, kami bersama pusat perencanaan kawasan strategis akan mengawal pelaksanaan program pengembangan infrastruktur PUPR pada tiga destinasi pariwisata prioritas, yakni Danau Toba, Mandalika dan Borobudur. Program yang didukung melalui pinjaman dari World Bank perlu dikawal dengan baik agar investasi pemerintah tepat sasaran, terpadu dan memberikan dampak bagi penguatan aksesibilitas dan pada akhirnya daya tarik pada 3 kawasan wisata tersebut. Pada akhirnya dukungan infrastruktur PUPR bisa memberikan manfaat meningkatnya jumlah wisatawan asing sesuai target Bapak Presiden serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Sebagai contoh program prioritas mendukung pariwisata Danau Toba yang telah tertuang dalam *Development Plan* Pulau Sumatera dan pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi-Siantar-Prapatan sepanjang 98,5 km yang terkoneksi dengan pusat kegiatan di kota Medan yang telah dimulai pada tahun 2016 dan akan berlanjut di tahun 2017. Adanya akses ini diharapkan dapat meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Danau Toba. Perencanaan terkait konektivitas kawasan ini juga terintegrasi dengan perencanaan penataan lingkungan, pembangunan sistem pengolahan sampah di Kabupaten Samosir, dan pembangunan rumah susun di Kabupaten Asahan yang juga akan didorong untuk dapat direalisasikan tahun 2017.

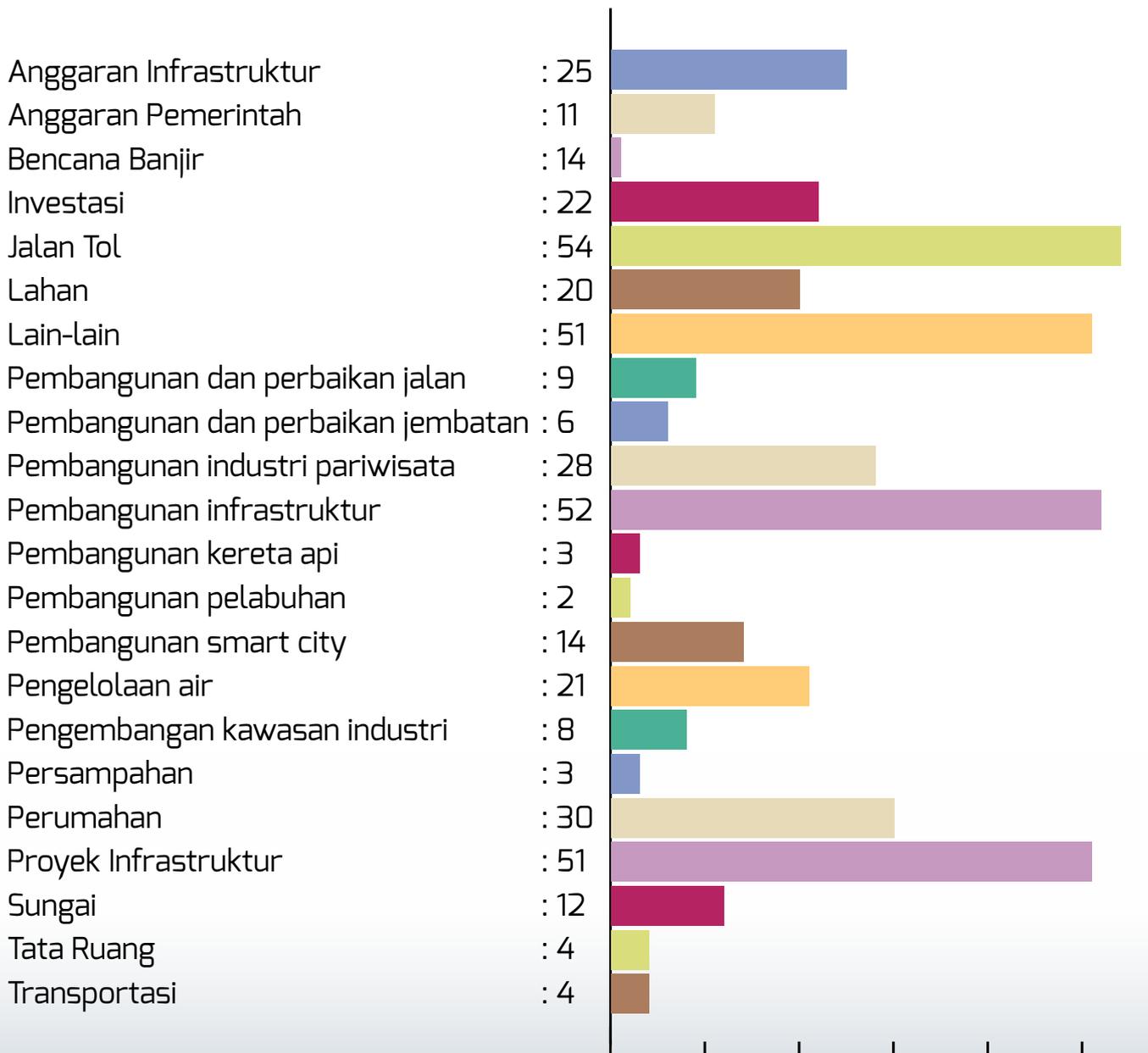
Terkait kawasan perbatasan, perencanaan infrastruktur PUPR yang akan didorong selain meneruskan program-program penguatan konektivitas dan penataan pos lintas batas di perbatasan negara di Kalimantan dan NTT serta pulau-pulau kecil terluar, kami akan memikirkan upaya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat terbangunannya jaringan jalan dengan mendorong pengembangan simpul-simpul permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat di sepanjang koridor jalan nasional tersebut.



Program – program tersebut diharapkan dapat mengutamakan keterpaduan, baik pada lintas sektor dan tingkat pemerintahan, sehingga program – program yang terimplementasi nantinya dapat terintegrasi dan tepat sasaran

# Infrastruktur PUPR Dalam Media Cetak

Kami membuat guntingan berita dengan topik infrastruktur dan topik lain yang berkaitan dengannya. Guntingan berita kami sarikan dari 7 media cetak, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Koran SINDO, Investor Daily, Republika, dan Bisnis Indonesia. Dengan adanya guntingan berita ini, diharapkan dapat diketahui opini publik yang berkembang seputar infrastruktur. Selain itu, dapat berguna sebagai media monitoring BPIW. Berikut ini adalah rangkuman pemberitaan mengenai infrastruktur dan yang berkaitan. Selama bulan November 2016. Total ada 446 berita dari 7 media periode 1 November - 31 November 2016.





#### Beberapa berita menarik selama bulan November:

1. Bisnis Indonesia, (Halaman 26) Rabu, 2 November 2016  
Data Aset Tanah Pemda Minim  
Kementerian PUPR mendorong pemda melakukan pendataan asset tanah
2. Investor Daily, (Halaman 23) Kamis, 3 November 2016  
PUPR Audit Kelayakan 800 Ribu Ha Jaringan Irigasi  
Kementerian PUPR melakukan audit kinerja jaringan irigasi seluas 800.000 ha pada tahun ini.
3. Investor Daily (Halaman 22) Kamis 3 November 2016  
PUPR Inventarisasi Aset Perumahan  
Kementerian PUPR bakal melakukan inventarisasi aset perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
4. Investor Daily (Halaman 6) Sabtu, 5 November 2016  
PUPR Kelola Aset Negara 802 T  
Kementerian PUPR mengelola aset negara sebesar 802 T berdasarkan laporan keuangan kementerian lembaga tahun 2015
5. Investor Daily (Halaman 6) Selasa 8 November 2016  
2017, Pemerintah sertifikasi 200 ribu pekerja konstruksi  
Kementerian PUPR menargetkan untuk menyertifikasi 200 ribu pekerja konstruksi pada tahun depan
6. Bisnis Indonesia (Halaman 7) Rabu 9 November 2016  
Dana Restorasi Danau 187 Miliar  
Kementerian PUPR mengalokasikan 187,50 miliar untuk melakukan proyek restorasi tujuh danau pada tahun ini
7. Bisnis Indonesia (Halaman 27) Jumat 25 November 2016  
Sebanyak 71 daerah dapat pendampingan  
KemenPUPR tengah melakukan pendampingan kepada 71 kabupaten dalam penyusunan perda tentang bangunan gedung hijau
8. Media Indonesia (Halaman 24) 17 November 2016  
Pemerintah Evaluasi 13 Bendungan  
Kementerian PUPR akan melakukan evaluasi terhadap desain 13 bendungan yang telah dimulai pada 2015
9. Bisnis Indonesia (Halaman 7) Selasa 1 November 2016  
Tak ada Lelang konsolidasi di PUPR  
Kementerian PUPR menegaskan bahwa lelang dini proyek tahun anggaran 2017 yang mulai dilaksanakan sejak Oktober 2016 tidak akan mencakup lelang konsolidasi
10. Republika (Halaman 15) Kamis 3 November 2016  
Proyek Dimulai Januari 2017  
Kementerian PUPR sudah mulai lelang Oktober 2016

# BPIW Akomodasi Masukan Pemerintah Desa Untuk Penyusunan Masterplan Kawasan Perdesaan Tabanan



*Rapat pembahasan Penyusunan Masterplan Kawasan Perdesaan Tabanan*

Saat ini telah disusun masterplan dan Pra Detail Engineering Design (DED) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), khususnya untuk Kabupaten Tabanan, Bali. Untuk lebih menyempurnakan masterplan dan Pra DED tersebut, dibutuhkan masukan banyak pihak, termasuk yang langsung bersentuhan dengan masalah perdesaan,

yakni aparat desa.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR, Agusta Ersada, saat Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Masterplan dan Pra DED Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional

Tabanan, di Bali, belum lama ini. Lebih lanjut Agusta menjelaskan, masterplan yang disusun tersebut, merupakan tindak lanjut dari pengembangan KPPN. Masterplan ini menurut Agusta merupakan dokumen kesepakatan bersama yang berisi visi misi yang dijabarkan pada matriks program. "Dengan adanya intervensi bersama diharapkan masterplan yang telah disusun dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. BPIW memiliki tanggung jawab dalam

yaitu pertama, penguatan 40 pusat - pusat pertumbuhan baru desa - kota. Kedua,

**Sasaran pengembangan wilayah, yaitu pertama, penguatan 40 pusat - pusat pertumbuhan baru desa - kota. Kedua, pengurangan desa tertinggal sebanyak 5 ribu desa, dan desa berkembang sebanyak 2 ribu desa.**

pengurangan desa tertinggal sebanyak 5 ribu desa, dan desa berkembang sebanyak

baik. Made juga menyebutkan, bahwa pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan kawasan secara luas, sehingga tidak ada lagi kota miskin yang ada di sekitar KPPN. Made juga meminta agar dalam pembangunan KPPN Tabanan tidak bisa dilepaskan dengan seni budaya, dikarenakan Tabanan sangat kental dengan budaya.

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, BPIW, Sanusi Sitorus menjelaskan KPPN Tabanan masuk kedalam 40 pusat pertumbuhan baru. Selain itu kawasan tersebut masuk kedalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) pertumbuhan wisata Gilimanuk - Denpasar - Padang Bay. Dalam WPS ini juga akan dibangun Anjungan Cerdas.

Dengan adanya rencana pembangunan Anjungan Cerdas tersebut menurut Sanusi diharapkan sebagian produksi pertanian akan dibawa ke Anjungan Cerdas tersebut. Dikatakannya juga bahwa masterplan KPPN tidak membuat desa menjadi kota, tapi melestarikan desa dengan cara mengembangkan sumber daya lokal yang tersedia. "petani tidak hanya menjual dalam bentuk mentah, melainkan produk olahan setidaknya menjadi intermediate produk," ungkap Sanusi.

Kegiatan ini dihadiri beberapa instansi seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan, Perwakilan Bappeda Tabanan, dan Ketua DPRD Tabanan. **Devi/infobpiw**



Sumber: Dok BPIW

menterpadukan infrastruktur yang ada," tutur Agusta.

Menurut Agusta, Tabanan merupakan salah satu lumbung pangan di Bali, selain itu juga memiliki potensi pada sektor perkebunan, khususnya kopi. Agusta juga menyatakan bahwa sasaran pengembangan wilayah,

2 ribu desa.

Saat membuka kegiatan tersebut, Perwakilan Sekretaris Bappeda Tabanan, I Made Widhi Dharma, menambahkan FGD merupakan sebagai ajang diskusi yang dihaapkan dapat melahirkan persepsi yang sama, sehingga desa membangun dapat diwujudkan dengan

# BPIW Dorong Barifola di Ternate Terus Berkembang



Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate terus meningkatkan kegiatan Barifola atau gotong royong bedah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pasalnya, Barifola dapat sangat membantu pemerintah dalam menekan angka rumah tak layak huni di Indonesia.

“Data saat ini ada sekitar 15 juta rumah tak layak huni di Indonesia. Untuk melakukan percepatan mengatasi rumah tak layak huni tersebut, memang perlu keterlibatan banyak pihak, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta kalangan swasta,” ungkap Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matri Ichwan didampingi Walikota Ternate, Burhan Abdurahman saat terjun langsung meninjau bedah rumah pola Barifola di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. (13/11).

Kalau hanya dibebankan terhadap Kementerian PUPR, lanjut Rido, pengentasan terhadap 15 juta rumah tak layak huni tidak mudah diwujudkan dalam waktu yang cepat. Sebab, diperlukan biaya yang tak sedikit untuk mengatasi 15 rumah tak layak huni menjadi layak huni.

Rido mengatakan, gerakan Barifola di Kota Ternate yang dalam pelaksanaannya

tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) perlu terus dipelihara dan ditingkatkan. “Bahkan, budaya seperti ini harus ditularkan ke daerah lain di seluruh negeri,” harapnya.

**Jika gerakan Barifola banyak diikuti pemerintah daerah lain, Rido yakin, pengentasan rumah tak layak huni di Indonesia akan semakin ringan dan berlangsung cepat.**

Jika gerakan Barifola banyak diikuti pemerintah daerah lain, Rido yakin, pengentasan rumah tak layak huni di Indonesia akan semakin ringan dan berlangsung cepat. “Iya saya kagum dengan keinginan masyarakat Kota Ternate dalam membantu sesama dengan memperbaiki rumah tak layak huni menjadi layak huni,” terangnya.

Selain meninjau bedah rumah pola Barifola, rombongan BPIW Kementerian PUPR juga meninjau sejumlah lokasi proyek bantuan Kementerian PUPR. Seperti pembangunan pengamanan garis pantai di kawasan barat Pulau Ternate.

Kemudian, rombongan juga menyempatkan meninjau Benteng Orange, salah satu bangunan bersejarah di Ternate yang kondisinya saat ini perlu mendapat sentuhan konservasi.

Walikota Ternate, Burhan Abdurahman mengatakan, inisiasi Barifola di Kota Ternate dilakukan Ikatan Keluarga Tidore (IKT). “Walau digagas IKT, sasarannya semua masyarakat Kota Ternate yang rumahnya sudah tak layak huni,” terang Abdurahman.

Setiap unit rumah yang dibangun atau renovasi membutuhkan dana sekitar Rp 40 juta tanpa biaya tukang. “Selain menyumbang tenaga, anggota IKT juga biasa menyumbang bahan bangunan. Istilahnya satu batu bata saja tetap punya nilai karena keikhlasan,” paparnya.

Dana untuk membiayai Barifola, lanjut Abdurahman, semua dilakukan atas kekuatan internal. “Kalau ada yang menyumbang, tentu tidak menolak. Namun pantang meminta sumbangan kepada lain,” ujarnya. Menurut Abdurahman, saat ini di Kota Ternate telah lebih dari 169 rumah yang tak layak huni dibangun menjadi rumah layak huni. ([ris/infoBPIW](mailto:ris@infoBPIW))

# BPIW Susun *Masterplan* Pengembangan KPPN Keruak-Praya



Sumber: Dok BPIW

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan bekerjasama dengan Direktur Perencanaan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Masterplan dan Pra Detailed Engineering Design (DED) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Keruak - Praya, Lombok, beberapa waktu lalu.

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, BPIW Kementerian PUPR, Sanusi Sitorus mengatakan, pelaksana utama pengembangan KPPN Keruak - Praya adalah pemerintah daerah dan desa, sehingga diperlukan kemauan keras dan inovasi dari pemerintah daerah.

Sanusi berharap, pemangku kepentingan di Kabupaten Lombok Timur diharapkan lebih aktif menyampaikan masukan dalam finalisasi masterplan dan pra DED

pengembangan KPPN Praya. "Kegiatan ini sebagai pertemuan final. Kemudian hasil dari pertemuan ini akan kami bawa ke pusat untuk dikoordinasikan antar kementerian/ lembaga terkait," terangnya.

Menurutnya, konsep yang diusung dalam

**Pelaksana utama pengembangan KPPN Keruak - Praya adalah pemerintah daerah dan desa, sehingga diperlukan kemauan keras dan inovasi dari pemerintah daerah.**

masterplan KPPN Praya adalah untuk meningkatkan nilai jual dari potensi yang ada.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur, Akhmad Dewanto menerangkan, Lombok Timur merupakan kawasan indikator dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). "Dapat dikatakan keberadaan Lombok Timur itu mewarnai

Provinsi NTB," terangnya.

Saat ini, lanjutnya, dana yang dimiliki Kabupaten Lombok Timur kondisinya terbatas. Oleh karena itu, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.

Menurutnya, seluruh elemen di Kabupaten Lombok Timur mendukung dan berperan aktif dalam rangka pengembangan KPPN Keruak - Praya.

Dalam FGD ini dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepala Unit Pertanian Keruak, Kepala Desa Senjiur, Kepala Desa

Ketapang Raya, Kepala Desa Pemas, Sekretaris Desa Tanjung Luar, Kepala Desa Selebung Ketangga serta Perwakilan Kabupaten Lombok Timur. (**devi/infoBPIW**)

# BPIW Dukung Program Infrastruktur Strategis Nasional

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membuat perencanaan demi mendukung program infrastruktur strategis nasional. Hal itu dikatakan Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur, BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono dalam Talkshow Speak After Lunch yang mengambil tema "Perencanaan Pembangunan PUPR Dalam Mendukung Program Infrastruktur Strategis Nasional" di Jakarta, Selasa (2/11). Ia mengakui, BPIW telah menyusun rencana strategis dari tahun 2015 hingga 2019.

"Intinya memuat bagaimana Kementerian PUPR dapat menyiapkan langkah, antara masalah konektivitas jaringan jalan, sumber daya air seperti bendungan dan irigasi,

---

**Saat ini fokus utama Kementerian PUPR sampai 2019, papar Hadi, antara lain program penambahan jaringan jalan tol baru sepanjang 1000 KM, jaringan jalan nasional 2.800 KM.**

---

keciptakaryaannya diantaranya air minum, sanitasi serta penyediaan perumahan", ujar Hadi.

Saat ini fokus utama Kementerian PUPR

sampai 2019, papar Hadi, antara lain program penambahan jaringan jalan tol baru sepanjang 1000 KM, jaringan jalan nasional 2.800 KM. "Untuk sumber daya air menargetkan dibangunnya 65 bendungan, irigasi untuk 1 juta hektare persawahan, termasuk pengadaan 1 juta rumah untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah,-red)," terang Hadi.

Selain itu, lanjutnya, Kementerian PUPR telah mencanangkan akses air minum 100%, bangunan kumuh

0% artinya sampai tidak ada lagi bangunan kumuh, sanitasi aksesnya 100%.

Untuk target tahun ini, Hadi menjelaskan, pembangunan infrastruktur lebih



diutamakan pada wilayah-wilayah yang sedang tumbuh dan berkembang yang telah dipetakan dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Melalui pendekatan WPS ini pembangunan infrastruktur dilakukan juga sesuai butuhan wilayah. “Sebagai contoh, Kementerian PUPR membantu kementerian lain untuk mengembangkan infrastruktur di kawasan pariwisata, seperti di sekitar Danau Toba. Pada kawasan Danau Toba akan diprioritaskan pembangunan jalan akses menuju lokasi wisata, kemudian penataan permukiman, air bersih dan penataan lingkungan di sekitarnya,” papar Hadi.

Di samping itu, Hadi mengatakan, saat ini

Kementerian PUPR lebih memperhatikan wilayah-wilayah yang di luar Jawa. “Seperti halnya Kalimantan, dalam hal ini kita menangani jalan di kawasan perbatasan

infrastruktur, Hadi berharap, Kementerian PUPR tidak bekerja sendiri, namun ada keterlibatan peran serta dari swasta dan seluruh pemerintah daerah. “Iya sesuai dengan semboyan Kementerian PUPR yakni, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat. Iya semuanya harus smart, smart development,” tutup Hadi. (ind/BPIW)

**Untuk target tahun ini, Hadi menjelaskan, pembangunan infrastruktur lebih diutamakan pada wilayah-wilayah yang sedang tumbuh dan berkembang yang telah dipetakan dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).**

dengan Malaysia. Begitu pula perbatasan Papua dengan Papua Nugini. Kita sedang menangani 7 lokasi perbatasan,” ungkap Hadi.

Untuk mempercepat pengembangan

# Dibutuhkan Kebijakan, Strategi dan Rencana Aksi untuk Implementasikan Agenda Baru Perkotaan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama pemangku kepentingan berupaya merumuskan kebijakan, strategi dan rencana aksi bersama untuk pengembangan wilayah dan perkotaan di Indonesia sesuai perkembangan global dan regional.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matahi Ichwan mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat menjadi *keynote speech* pada acara “Diseminasi Implementasi Agenda Baru Global dan Nasional dalam Pengembangan Wilayah dan Perkotaan di Indonesia” yang digelar di Bali, akhir pekan lalu.

Menurut Rido, saat ini pengembangan wilayah dan perkotaan di dunia, terutama di negara berkembang berlangsung dinamis. Untuk isu perkotaan di Indonesia yang kerap muncul antara lain, persoalan banjir, genangan air, kawasan kumuh, kemacetan, sampah, serta akses air minum layak bagi masyarakat. “Terhadap Isu-isu tersebut, tentunya perlu penyelesaian saat ini dan masa depan,” papar Rido.

Dalam merumuskan penyelesaian tersebut, lanjutnya, dibutuhkan tata kelola perkotaan dan wilayah yang progresif, adaptif dan inovatif, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai entitas perkotaan dan wilayah.

Rido menjelaskan, agenda pembangunan global 2030 yang memuat Sustainable Development Goals (SDGs) menekankan peran perkotaan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya terkait tantangan dan peluang dari Urbanisasi.

Pada konferensi Habitat III juga menegaskan komitmen negara-negara di dunia dalam pembangunan perkotaan layak huni dan berkelanjutan melalui Agenda Baru Perkotaan atau New Urban Agenda yang membawa tema sustainable development (pembangunan berkelanjutan,-red),” papar Rido.

Ia menjelaskan, berbagai kendala dan tantangan seperti kapasitas kelembagaan pemerintah, pendanaan pemerintah, maupun minimnya jejaring investasi dapat menjadi penghambat pengembangan perkotaan dan



Kepala BPIW, Rido Matari saat memberi paparan

Sumber: Dok. BPIW

kewilayahan di Indonesia.

“Untuk itu, sudah seyogyanya mengidentifikasi berbagai peluang sumber daya serta berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di setiap tingkat, guna terwujud pengembangan perkotaan dan wilayah yang berkelanjutan di Indonesia,” papar Rido.

Kementerian PUPR melalui BPIW, lanjutnya, bersama pemangku kepentingan perlu merumuskan langkah agar dapat mengimplementasikan agenda baru perkotaan dan wilayah di Indonesia dengan pendekatan baru sesuai perkembangan global. “Untuk itu peran aktif para pemangku kepentingan sangat diharapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW, Hadi Sucahyono menegaskan, agenda perkotaan baru merupakan instrument strategis untuk mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan.

“Setiap negara memiliki isu strategis,

karakteristik dan pendekatan tersendiri dalam mengimplementasikan agenda perkotaan baru,” terangnya.

Dengan begitu, lanjutnya, dibutuhkan rencana aksi bersama yang dapat menerpadukan

**Agenda pembangunan global 2030 yang memuat *Sustainable Development Goals* (SDGs) menekankan peran perkotaan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya terkait tantangan dan peluang dari Urbanisasi.**

peran setiap pihak untuk mencapai cita-cita bersama berupa terwujudnya permukiman, perkotaan dan wilayah yang memberikan kehidupan lebih baik untuk generasi yang akan datang.

Hadir menjadi pembicara dalam acara

tersebut, Menteri Pekerjaan Umum 2004-2014, Djoko Kirmanto, Perwakilan UN Habitat Fukuoka, Bruno Dercon, Salah seorang penulis buku *Internasional Guidelines on Urban and Territorial Planning*,

Imam S Ernawi, Ketua Dewan Eksekutif Kemitraan Habitat, Wicaksono Sarosa serta *Lead Municipal Engineer World Bank Indonesia*, George Soraya.

Selain itu, hadir juga para peserta mulai dari perwakilan unit organisasi di Kementerian PUPR, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, sejumlah walikota dan bupati, Bappeda provinsi dan kabupaten/kota, kalangan akademis, swasta, asosiasi serta perwakilan Non-Governmental Organization (NGO). ([ris/ind/infoBPIW](http://ris/ind/infoBPIW))

# Kepala BPIW Arahkan Anjungan Cerdas Adopsi Karakter dan Kearifan Lokal

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengarahkan

pe m b a n g u n a n

Anjungan Cerdas mengadopsi karakter dan kearifan lokal daerah setempat.

Hal itu terungkap saat Kepala BPIW Kementerian PUPR,

Rido Matari Ichwan dan rombongan meninjau langsung pembangunan Anjungan Cerdas di Rambut Siwi, Bali, (5/11).

Rido mengatakan, Anjungan Cerdas di Rambut Siwi berada dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Gilimanuk–Denpasar–Padang

**Anjungan Cerdas diharapkan dapat menjadi tempat yang efektif untuk memasarkan produk-produk lokal.**

pengguna jalan nasional merupakan masyarakat nasional, sehingga Anjungan Cerdas diharapkan dapat menjadi tempat

Bai akan berfungsi sebagai tempat melepas kepenatan pengguna jalan nasional sebelum melanjutkan ke tempat tujuan.

M e n u r u t n y a ,



yang efektif untuk memasarkan produk-produk lokal yang ada di sekitar Gilimanuk – Denpasar – Padang Bai pada masyarakat nasional, termasuk para wisatawan asing. Dengan begitu, Rido berharap, masyarakat

yang berada di sekitaran Gilimanuk–Denpasar–Padang Bai untuk siap-siap memanfaatkan hasil pembangunan Anjungan Cerdas.

“Selain untuk memasarkan produk-produk unggulan lokal yang ada, masyarakat juga dapat berlomba menampilkan kreasi-kreasi seni, karena dalam Anjungan Cerdas ini terdapat panggung pertunjukan serta amphitheater yang dibangun khusus untuk menampilkan beragam kesenian khas Bali,” terang Rido.

Rido juga berpesan, agar pembangunan Anjungan Cerdas ini mengadopsi karakter dan kearifan lokal. “Termasuk dalam

Di tempat yang sama, Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, BPIW,

yang baik, cipta karya melalui bangunan yang ramahnya lingkungan dan berkarakter.

### Pengguna jalan nasional merupakan masyarakat nasional, sehingga Anjungan Cerdas diharapkan dapat menjadi tempat yang efektif untuk memasarkan produk-produk lokal yang ada di sekitar Gilimanuk – Denpasar – Padang Bai

Hadi Sucahyono mengatakan, Anjungan Cerdas ini diproyeksi sebagai jendelanya Kementerian PUPR, sehingga perlu juga

Kemudian, perumahan melalui pos-pos dan tempat beristirahat yang membuat pengunjung betah,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, BPIW mengarahkan bangunan di area Anjungan Cerdas ditampilkan dengan artistik yang berkarakter Bali, agar keberadaannya mampu menarik minat pengunjung.

Seperti diketahui, proses konstruksi fisik Anjungan Cerdas tersebut ditargetkan selesai serta dapat dimanfaatkan masyarakat pada pertengahan tahun 2018.

**(ris/infoBPIW)**



pengelolaanya ke depan, perlu untuk selalu mensinergikan antara masyarakat, ketua adat serta pemerintah daerah, agar manfaat dari keberadaan Anjungan Cerdas ini benar-benar dirasakan oleh semua,” terangnya.

mengadopsi unsur infrastruktur yang ada di Kementerian PUPR.

“Misalnya sumber daya air melalui hadirnya bangunan air siap minum, bina marga melalui hadirnya jalan dan tempat parkir

# ***Menteri PUPR Lakukan Rotasi Pejabat Eselon II***



---

“Saya mengingatkan kita semua sumpah suci dalam melandasi niat kita dalam melaksanakan tugas,” kata Basuki.

---

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengingatkan kembali kepada para pejabat, bahwa sumpah yang diucapkan harus benar-benar dilaksanakan, seperti tidak melakukan korupsi dan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan.

“Saya mengingatkan kita semua sumpah suci dalam melandasi niat kita dalam melaksanakan tugas.” kata Basuki, saat melakukan rotasi delapan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian PUPR, Jumat (11/11).

Basuki juga meminta kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar tetap menjaga semangat kerja, untuk melaksanakan amanah, untuk membelanjakan uang negara sesuai



dengan tugas dan juga tetap hidup sederhana. Menurut Basuki, rotasi dan promosi merupakan hal yang biasa dan merupakan suatu keharusan dalam rangka untuk mendinamisasikan jalannya suatu organisasi. "Saya berharap pekerjaan tahun depan dapat lebih banyak yang dilakukan lelang dini, sehingga pekerjaan bisa dimulai sejak awal tahun. Progres lelang dini hingga hari ini sebanyak 1.556 paket pekerjaan sudah dilelang dengan nilai Rp 8,16 triliun," ungkap Basuki.

Dari delapan pejabat tersebut, juga dilantik beberapa pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

(BPIW), seperti Bobby Prabowo sebagai Kepala Pusat Perencanaan infrastruktur PUPR, dan Hadi Sucahyono sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis.

**Menurut Basuki, rotasi dan promosi merupakan hal yang biasa dan merupakan suatu keharusan dalam rangka untuk mendinamisasikan jalannya suatu organisasi**

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 334/KPTS/M/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian PUPR.

Basuki menyatakan rasa terimakasihnya kepada seluruh jajaran di kementerian PUPR yang telah bekerja

keras guna mencapai target penyerapan di akhir tahun ini dengan target 93% atau sama dengan penyerapan tahun lalu.

**(INI/InfoBPIW)**

# BPIW Susun Pengembangan Kawasan Metropolitan Baru Palembang Raya

Metropolitan Baru Palembang Raya merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Kawasan metropolitan baru tersebut mencakup Kota Palembang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), sebagian Kabupaten Banyuasin, sebagian Kabupaten Ogan Ilir, dan sebagian Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Ir. Rido Matari Ichwan, MCP mengatakan, salah satu bentuk dukungan yang dilakukan BPIW adalah melakukan perencanaan

pengembangan infrastruktur PUPR terpadu di kawasan metropolitan baru tersebut.

Untuk itu BPIW akan membuat masterplan pengembangan Metropolitan Baru Palembang Raya yang dilengkapi dengan program pembangunan infrastruktur sebagai acuan dalam pengembangan infrastruktur PUPR.

Hal itu disampaikan Rido, saat pelaksanaan



*Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan memberikan paparan mengenai rencana pengembangan Metropolitan Palembang Raya.*

Seminar Pengembangan Metropolitan Palembang Raya, di Aula Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, di Palembang, Selasa (15/11). Menurut Rido seminar tersebut digelar untuk menjangkau aspirasi, menyerap rekomendasi kajian, studi dan mengakomodasi masukan dari praktisi dan akademisi perencanaan perkotaan.

“Total penduduk Kawasan Metropolitan Palembang Raya ini mencapai 3,5 juta jiwa pada tahun 2015, dan ini menjadi kekuatan besar untuk tersedianya sarana perkotaan yang memadai. Kota Palembang menjadi kota inti dari kota-kota sekitarnya. Untuk itu, dalam seminar ini diperlukan masukan dari berbagai kalangan, misalnya apakah perlu tata ruang khusus bagi Kota Palembang,” tutur Rido.

Lebih lanjut Rido menjelaskan, konsep pengembangan Metropolitan Palembang Raya menitikberatkan pada pengembangan



dua kota inti dengan fungsi yang berbeda, dimana Tanjung Api-Api sebagai pengembangan industri dan Kota Palembang sebagai pengembangan perdagangan dan jasa. Kemudian pengembangan kota-kota satelit yang mandiri dengan fungsi berbeda-beda. Kota Palembang berperan sebagai kota inti yang merupakan pusat perdagangan dan

Jasa Skala Nasional.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api sebagai Kota Satelit I yang merupakan pusat industri pengolahan. Perkotaan Indralaya dan Kayu Agung sebagai Kota Satelit II yang merupakan pusat perdagangan dan Jasa Skala Kabupaten. Kawasan Jakabaring, Talang Kelapa dan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Telang sebagai kawasan pendukung metropolitan dalam penyediaan perumahan. Kawasan Kertapati sebagai kawasan penghubung inter atau intra Metropolitan Palembang.

Dalam pengembangan Metropolitan Palembang Raya menurut Rido dilakukan dengan pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yakni WPS 5 Jambi-Palembang-Bangka Belitung dan WPS 6 Merak-Bakauheni- Bandar

Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api. “Jadi kita membangun infrastruktur seperti jalan tol, penyediaan perumahan yang layak huni, penataan kawasan kumuh, penyediaan air bersih dan sanitasi,” ungkapnya.

Kegiatan yang diadakan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW ini juga menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan walikota Palembang, Eddy Santana Putra, dan Ibnu Syabri dari SAPPK ITB. Selain itu pada acara tersebut narasumber dari Universitas Sriwijaya yakni Erika Buchori, DR. Ir. Dinar DAP., Eddy Ganefo, dan Ir. Hardayani Haruno MT. Erika Buchori dari Universitas Sriwijaya

Hadir juga dalam acara tersebut, para perwakilan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Palembang Raya, Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan Pemerintah Kabupaten

Banyuasin Ogan Komering Ilir, Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Real Estat Indonesia (REI), Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia, dan Ikatan Ahli Arsitek (IAI).

Seminar tersebut juga diisi dengan sambutan dari Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang Pembangunan, Ucok Hidayat dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, Subriyer Nasir. [Hen/INI/infobpiw](mailto:Hen/INI/infobpiw)

---

**BPIW akan membuat  
masterplan pengembangan  
Metropolitan Baru Palembang  
Raya yang dilengkapi dengan  
program pembangunan  
infrastruktur sebagai acuan  
dalam pengembangan  
infrastruktur PUPR.**

---

# Pemerintah Buka Peluang Investasi di Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung

---

Saat ini pemerintah memiliki sejumlah rencana pembangunan infrastruktur yang dapat menjadi peluang investasi bagi untuk para investor.

---



Sumber: Dok BPIW

Pemerintah membuka kesempatan bagi para investor swasta, untuk mengembangkan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu Tanjung Lesung di Provinsi Banten. Saat ini pemerintah memiliki sejumlah rencana pembangunan infrastruktur yang dapat menjadi peluang investasi bagi untuk para investor.

Berikut yang disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rezeki Peranginangin, saat menjadi pembicara pada acara Indonesia *Tourism Investment Business Forum*, di Tanjung Lesung, akhir pekan lalu.

Pada kesempatan tersebut, Rezeki menjelaskan beberapa rencana program dalam pengembangan KSPN Tanjung Lesung yang telah disusun oleh BPIW. Ia juga menyampaikan peluang

Dari sektor perumahan, menurut Rezeki terdapat peluang investasi pembangunan rumah susun untuk pekerja di sektor

## Kawasan Panimbang sebagai simpul utama koridor dalam menyerap arus wisatawan dari arah timur dan utara

pariwisata yang diperkirakan sekitar 500 orang dengan 5 *twin blocks*. Besar harapan kami program-program tersebut dapat

timur dan utara. Kemudian kawasan Sumur yang dikombinasikan dengan Pulau Umang sebagai atraksi yang komplementer dengan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.

Hadir pula dalam acara ini, Anggota Tim Pokja Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas yang menangani pengembangan kawasan pariwisata Tanjung Lesung. **(INI/InfoBPIW)**



Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Rezeki Peranginangin, saat menjadi pembicara

investasi swasta pada infrastruktur PUPR, seperti rencana pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang sepanjang 83,9 km, pembangunan sistem penyediaan air minum, pengolahan akhir sampah berteknologi tinggi dan pengolahan air limbah berskala kawasan yang melayani daeah komersil, serta inkubasi kawasan sebagai embrio destinasi wisata baru seperti Anjungan Cerdas.

menjadi peluang investasi swasta pada infrastruktur PUPR,” jelas Rezeki.

Pada kesempatan yang sama, Rezeki meyampaikan rencana inkubasi destinasi wisata Tanjung Lesung yaitu mencakup Ujung Jaya sebagai *gateway* menuju Taman Nasional Ujung Kulon. Selain itu kawasan Panimbang sebagai simpul utama koridor dalam menyerap arus wisatawan dari arah

# Koordinasi Lintas Sektor Dibutuhkan dalam Pengembangan Perkotaan

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan infrastruktur perkotaan di daerahnya.

"Koordinasi yang baik perlu dilakukan untuk menghindari persoalan tata ruang dalam pengembangan perkotaan," terang Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan saat memaparkan "Mewujudkan Keterpaduan Infrastruktur Perkotaan yang Efektif dan Efisien" pada Urban Dialog: Indonesia Planning Outlook 2017 dalam Kongres Nasional Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia ke-XI di Jakarta, Kamis (3/11)

Menurutnya, persoalan tata ruang biasanya dilatarbelakangi koordinasi yang kurang terjalin dengan baik. Dengan begitu, lanjutnya, pengembangan perkotaan perlu melibatkan lintas sektoral. "Baik lintas kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan lainnya," jelas Rido.

la mencontohkan, Kementerian PUPR saat ini memberikan dukungan infrastruktur terhadap lintas sektoral, seperti pada kawasan industri ekonomi khusus, kawasan perdesaan prioritas, kawasan strategis pariwisata nasional dan lainnya. "Dalam

---

**Kementerian PUPR saat ini memberikan dukungan infrastruktur terhadap lintas sektoral, seperti pada kawasan industri ekonomi khusus.**

---

mendukung kawasan-kawasan tersebut, Kementerian PUPR senantiasa melakukan koordinasi dengan sektor-sektor terkait," lanjutnya.

Di sisi lain, Rido mengungkapkan, isu-isu perkotaan di Indonesia yang terjadi saat ini antara lain, persoalan banjir, genangan air, kawasan kumuh, kemacetan, sampah, serta akses air minum layak bagi masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan perkotaan

tersebut, BPIW mendorong pemerintah daerah mengembangkan konsepsi Kota Cerdas Berkelanjutan di daerahnya. Menurut Rido, konsepsi Kota Cerdas Berkelanjutan memiliki tujuan menciptakan ruang perkotaan yang berkualitas untuk membuat

masyarakat menjadi lebih aman, sehat, sejahtera, bahagia, dan selamat.

"Kota Cerdas Berkelanjutan, kawasan perkotaan itu harus memiliki 20 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH), 20 persen jalan dan pedestrian, serta pengelolaan sampah yang baik dan lainnya." paparnya.

Di tempat yang sama hadir pembicara lain, yakni Direktur

Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Budi Situmorang, Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Kemaritiman Ridwan Djamiludin, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Walikota Makassar Ramadhan Pomanto, dan Bupati Agam, Indra Catri.

Budi Situmorang menyatakan, konflik tata ruang perlu juga menjadi perhatian para



planner (perencana) perkotaan. Menurutnya, saat ini penataan kota cenderung belum ideal karena pengembangannya hanya mengikuti tren. "Perencanaan kota dilakukan dengan tidak ideal," terangnya.

Dari perencanaan perkotaan yang tidak ideal, lanjutnya, berimplikasi pada kualitas tata ruang yang dihasilkan tidak ideal juga dan cenderung kurang memuaskan masyarakat. Menurutnya, kalau konflik tata ruang terjadi kerap berlangsung lama. Kemudian akan berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi, investasi, dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Di tempat yang sama, Ridwan Djamiludin menyatakan, koordinasi dan keterpaduan merupakan kunci dalam mengembangkan kota. Terlebih, biaya untuk pengembangan infrastruktur kota tidak murah. "Untuk itu dalam perencanaan pengembangan kota perlu mematuhi nilai-nilai dan mengedepankan koordinasi," katanya. Walikota Bandung, Ridwan Kamil mengungkapkan, Pemerintah Kota

(Pemkot) Bandung senantiasa berkomitmen membangun kota yang maju dengan membuka ruang koordinasi yang luas untuk berbagai pihak. "Termasuk koordinasi dengan perencana perkotaan," terangnya.

**Persoalan tata ruang biasanya dilatarbelakangi koordinasi yang kurang terjalin dengan baik. Dengan begitu, lanjutnya, pengembangan perkotaan perlu melibatkan lintas sektoral.**

la mengakui, beragam konflik tata ruang kerap dialami Pemkot Bandung. Salah satunya rencana pencabutan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurunya, dalam mewujudkan pembangunan perkotaan memang perlu keterlibatan banyak sektor. "Walau kadang untuk melakukan hal yang sederhana

saja, perlu waktu panjang dan birokrasi berjenjang. Padahal di sisi lain, masyarakat kota sudah banyak yang menyampaikan aspirasi ke kantor pemkot alias demo, banyak yang protes di media sosial dan lainnya," terangnya.

Pengembangan kota sejatinya sesuatu yang memerlukan proses, sehingga semua pihak harus berlomba-lomba memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan kota. "Agar kota cepat maju dan berkembang," terang Ridwan.

Sementara itu, Walikota Makassar, Ramadhan Pomanto mengatakan, dalam mewujudkan percepatan pembangunan kota memerlukan dana yang tidak sedikit. Untuk itu, lanjutnya, pembangunan daerah senantiasa perlu dukungan pusat. "Kalau hanya mengandalkan kemampuan finansial daerah, berat memang," terangnya. Untuk itu, lanjutnya, dukungan banyak pihak memang menjadi kunci utama dalam percepatan pengembangan kota. **(ris/infoBPIW)**

# BPIW Siapkan Peta Dukungan Infrastruktur PUPR untuk Pengembangan Danau Toba

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rezeki Peranginangin mengatakan, instansinya siap menyusun peta dukungan menyeluruh infrastruktur PUPR untuk pengembangan Danau Toba. "Dalam peta tersebut akan memuat titik-titik dukungan infrastruktur PUPR, mulai dari dukungan Ditjen (Direktorat Jendral,-red) Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga dan Ditjen Penyediaan Perumahan," ungkap Rezeki dalam Rapat Penyampaian Progress Program Pengembangan

Pariwisata Danau Toba di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim), Jakarta, Selasa (8/11). Ia menambahkan, dukungan infrastruktur

---

**Kementerian PUPR terus melakukan percepatan dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas Danau Toba.**

---

PUPR untuk pengembangan Danau Toba, yakni Ditjen Sumber Daya Air meliputi pembangunan embung, pembersihan eceng gondok, irigasi dan lainnya. Sedangkan Ditjen

Cipta Karya seperti pembangunan IPAL (instalasi pengelolaan air limbah,-red).

"Kemudian Dirjen Bina Marga dari sisi konektivitas akses, untuk pengembangan dan pemantapan jalan dan jembatan. Adapun Ditjen Penyediaan Perumahan melakukan pembangunan perumahan," paparnya.

Rezeki menyatakan, Kementerian PUPR terus melakukan percepatan dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas Danau

Toba. Saat ini, lanjutnya, perkembangan dukungan itu ada yang telah, sedang dan akan dilaksanakan

Rezeki menjelaskan, untuk memperlancar



Sumber: Dok BPIW

akses dan konektivitas menuju Danau Toba kini telah dilakukan rekonstruksi jalan menuju Bandara Sibisa sepanjang 15,6 KM, yakni mulai dari Desa Girsang ke Bandara Sibisa.

“Pada 2017, Kementerian PUPR akan melakukan pengaspalan jalan sepanjang 2,5 KM di Lingkar Parapat. Kemudian akan ada juga pengembangan jalan lingkar dalam Samosir yang saat ini sudah memasuki tahap lelang,” jelasnya.

“Kemudian ada juga rencana pembangunan jembatan Tano Ponggol. Saat ini DEDnya (Detail Engineering Design,-red) telah selesai,” paparnya.

Selain itu akan dibangun Jalan Tol Tebing Tinggi-Parapat dengan target selesai 2019. Untuk proyek Jalan Tol Tebing Tinggi-Parapat akan dilakukan join venture (kerjasama modal) BUMN. “Rencananya penandatanganan kerjasama itu akan

dilakukan pada November 2016. Adapun untuk feasibility study (FS) sudah mencapai sekitar 80%,” terang Rezeki.

Untuk restorasi Danau Toba tahun ini masih dilakukan pembersihan terhadap eceng

**Untuk memperlancar akses dan konektivitas menuju Danau Toba kini telah dilakukan rekonstruksi jalan menuju Bandara Sibisa sepanjang 15,6 KM, yakni mulai dari Desa Girsang ke Bandara Sibisa.**

gondok seluas 5.000 M2. Kemudian juga ada rencana pembangunan lima embung untuk kebutuhan air baku di Kabupaten Samosir. “Untuk pembangunan embung-embung perkembangannya dalam tahap penyelesaian pembebasan lahan. Serta, ada juga rencana pembangunan untuk permukiman,” ujarnya. Selain perwakilan Kementerian PUPR, hadir

juga dalam rapat tersebut perwakilan Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Di tempat yang sama, pimpinan rapat yang juga Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim, Ridwan Jamaludin mengapresiasi langkah-langkah Kementerian PUPR. Ia berharap, pada saat rapat dengan Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan, seluruh dukungan

dari lintas kementerian tersebut sudah dapat diintegrasikan dengan baik. **(ris/infoBPIW)**

# BPIW Susun Katalog Program Infrastruktur Perkotaan Menengah

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan akan menyusun katalog program infrastruktur perkotaan menengah.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, katalog program infrastruktur perkotaan menengah tersebut diharapkan akan menjadi referensi program infrastruktur terhadap para kepala daerah.

“Baik referensi program infrastruktur waktu terdekat, jangka menengah maupun panjang,” ujar Agusta saat membuka Focus Group Discussion (FGD) “Prospek dan Tantangan Kota Menengah: Menuju Keterpaduan Infrastruktur Perkotaan” yang digelar di Jakarta, Kamis (10/11).

Hadir sejumlah pakar dan praktisi perencanaan perkotaan sebagai narasumber dalam FGD tersebut, antara lain Hendricus



Andy Simarmata, Bayu Wirawan, Ajat R Jatnika serta peserta perwakilan dari unit organisasi di Kementerian PUPR.

Agusta mengatakan, katalog yang akan disusun nantinya itu terdiri dari katalog program infrastruktur perkotaan menengah, besar dan perdesaan. “Untuk FGD saat ini kita lebih difokuskan pada rencana untuk

menyusunan katalog program infrastruktur perkotaan menengah,” papar Agusta. Agusta juga berharap, para narasumber yang hadir dapat memberikan banyak masukan, agar katalog yang merupakan rangkuman dari berbagai masukan tersebut komprehensif. “Memuat prospek dan tantangan kota menengah, tepat sasaran dalam mendorong perkembangan kota menengah yang mandiri dan meningkatkan daya saing kotanya,” terangnya.

Di tempat yang sama, Hendricus Andy Simmarmata mengatakan, tren kota menengah di Indonesia saat ini mengalami peningkatan pesat. “Jika dicermati ada 900 kota otonomi. Tapi kini muncul 300 kota yang mengikuti Jakarta

kawasan kota secara horinsontal tanpa adanya keterpaduan dengan penyediaan sarana lainnya.

“Isu lainnya adalah tidak siapnya

kebutuhan orang yang terbatas terkait dengan pengendalian size kota serta harus ada pendekatan yang ramah lingkungan,” jelasnya.

## Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga mengatakan, seluruh rencana pembangunan infrastruktur perkotaan harus memegang prinsip Cerdas Berkelanjutan.

infrastruktur, berkurangnya potensi sumber daya air, berkurangnya lahan, inefisiensi aktivitas serta hilangnya identitas,” terang Hendricus.

Di tempat sama, Bayu Wirawan menyatakan, kota menengah merupakan perkotaan yang terbentuk akibat belum berkembangnya menjadi kota besar. “Isu yang menyertai kota menengah antara lain, okupansi lahan terbangun yang belum terpusat, perkembangan wilayah terjadi secara parsial, minimnya aglomerasi aktivitas ekonomi,”

terangnya. Menurutnya, intervensi yang dibutuhkan kebutuhan kota menengah antara lain, redefine dan penetapan terhadap kota

menengah. “Kemudian, perlunya pengembangan konektivitas, penguatan infrastruktur internal, integrasi dan tata kelola penataan ruang,” terangnya

Selain itu, lanjutnya, diperlukan elaborasi dan diseminasi inisiatif cerdas terkait pembangunan dan pengelolaan infrastruktur.

**(ris/infoBPIW)**



untuk membesar,” terang akademisi Universitas Indonesia (UI) ini.

Lebih lanjut, Hendricus mengatakan, isu yang tengah menyertai perkotaan menengah mulai dari, urban sprawl atau tumbuhnya sebuah kota menengah tanpa perencanaan akan menimbulkan perluasan

Menurutnya, diperlukan intervensi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai isu perkotaan menengah tersebut. “Seperti adanya pengendalian lahan terbangun atau compact city, adanya pengembangan infrastruktur khusus sesuai tema kota, adanya pengarahan untuk hanya memenuhi

# BPIW Susun Pengembangan Kota Baru Sofifi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendorong percepatan pengembangan Kota Baru Publik Sofifi di Provinsi Maluku Utara. "Dalam RJPMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,-red) 2015-2019, Sofifi merupakan satu dari 10 kota baru publik yang dicanangkan untuk berkembang. Untuk itu perlu komitmen bersama dari para pemangku kepentingan, agar harapan Kota Baru Publik Sofifi berkembang dapat terwujud," papar Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari dalam seminar dan sharing session "Percepatan Pembangunan Kota Sofifi" di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku, Kota Sofifi, Rabu (9/11).

Ia berharap, Kota Baru Publik Sofifi dapat cepat berkembang menjadi ibu kota Provinsi Maluku Utara yang ideal. Dalam membangun perkotaan, Rido mengingatkan, perlu memegang prinsip Cerdas Berkelanjutan. Cerdas dalam menjalankan pembangunan yang efektif, efisien, serta dapat menjawab kebutuhan masyarakat

dalam era teknologi. "Berkelanjutan, dalam mewujudkan kawasan yang nyaman, layak huni sampai generasi mendatang," terang Rido.

Untuk mendukung pengembangan Kota Baru Publik Sofifi, lanjut Rido, Kementerian PUPR

**"Dalam RJPMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,-red) 2015-2019, Sofifi merupakan satu dari 10 kota baru publik yang dicanangkan untuk berkembang. Untuk itu perlu komitmen bersama dari para pemangku kepentingan," papar Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari.**

pada 2018 telah memprogramkan berbagai program pembangunan infrastruktur PUPR, antara lain gedung pengolahan hasil perkebunan Desa Galala dan Bukit Durian. "Ada juga program pembangunan drainase lingkungan, pembangunan perumahan dan rumah susun sewa (Rusunawa) bagi PNS

(Pegawai Negeri Sipil,-red)," terang Rido.

Selain itu, ada pembangunan embung jaya di Desa Sofifi, pembangunan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) di Kecamatan Oba Utara, penyediaan pipa saluran air bersih desa, peningkatan jaringan jalan menuju Pelabuhan Pengumpul Sofifi. Kemudian, ada juga program pencegahan dan peningkatan terhadap kawasan pemukiman kumuh, pembangunan perumahan swadaya, pembangunan rumah khusus nelayan,

Ada program pembangunan kontruksi break water atau pengamanan garis Pantai Guraping. "Pembangunan sumur bor di Kecamatan Bukit Duri, pembangunan rusunawa mahasiswa Universitas Hairun, pembangunan rumah MBR

(Masyarakat Berpenghasilan Rendah,-red)," jelasnya. Ia menambahkan, program pembangunan Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) Kota Sofifi serta pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kaiyasa.

Rido juga berharap Pemprov Maluku Utara



dapat menggandeng kalangan swasta untuk sama-sama membangun Kota Baru Sofifi, agar manfaat pembangunan dapat cepat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tempat yang sama, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Uke M Husein mengatakan, dalam pengembangan Kota Baru Publik Sofifi perlu adanya penerapan aturan tata ruang yang serius, agar perkembangan kota ke depannya dapat sesuai yang diharapkan.

Ia menerangkan, kerja dalam melakukan penataan ruang dimulai melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring. "Dalam pengembangan kota adalah penting mengikuti perencanaan tata ruang, agar kota ini berkembang secara berkelanjutan sesuai harapan," terangnya. Di tempat yang sama, Mudrajad Kuncoro, ekonom Universitas Gajah Mada (UGM) mengatakan, pengembangan Kota Baru Publik Sofifi merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk dapat

meningkatkan kualitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Ia mengatakan, meningkatnya kualitas dan terciptanya pemerataan pertumbuhan ekonomi akan efektif dalam menurunkan

**Rido juga berharap Pemprov Maluku Utara dapat menggandeng kalangan swasta untuk sama-sama membangun Kota Baru Sofifi, agar manfaat pembangunan dapat cepat dirasakan langsung oleh masyarakat.**

angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, ia berharap, pengembangan Kota Baru Sofifi dapat dimanfaatkan dengan optimal.

Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba mengaku, pihaknya akan melakukan langkah-langkah strategis demi mendukung percepatan pengembangan Kota Baru Publik

Sofifi. "Seperti mengupayakan terbentuknya Perda RTRW Kota Baru Publik Sofifi," terangnya.

Selain itu, lanjutnya, koordinasi Pemprov Maluku Utara dan pemerintah kabupaten/kota terkait pengembangan Sofifi akan semakin ditingkatkan. Termasuk, koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat pemerintah pusat. "Termasuk melibatkan swasta untuk sama-sama mengembangkan Sofifi," terangnya.

Seminar yang dibuka langsung Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba ini menghadirkan sejumlah nara sumber, yakni Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, Ekonom Universitas Gajah Mada, Mudrajad Kuncoro, Direktur Tata Ruang, Badan Perencanaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Uke M Husein, serta perwakilan Kementerian Perhubungan. **(ris/infoBPIW)**



# Pengembangan Pulau- Pulau Kecil Terluar

*Nawacita Pemerintahan Kabinet Kerja mengamanatkan pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berangkat dari amanat tersebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan pulau-pulau terluar.*

Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran untuk mewujudkan visi Kementerian PUPR, yakni "Terwujudnya infrastruktur PUPR yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Visi tersebut diterapkan untuk pengembangan infrastruktur, terutama di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Pengembangan kawasan ini juga dilakukan dengan pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Dengan pendekatan WPS ini, perencanaan pengembangan infrastruktur dilakukan untuk menciptakan keterpaduan infrastruktur PUPR, baik dalam WPS maupun antar WPS. Pengembangan infrastruktur melalui pendekatan WPS memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan.

Seluruh PPKT yang tersebar di beberapa tempat tersebut dikelompokkan pada WPS 35 atau WPS Pulau-Pulau Kecil Terluar. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) NO.78/2005 Pasal 1 Huruf b. PPKT yaitu pulau yang mempunyai luas ≤2.000 KM2 memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal kepulauan sesuai dengan hukum nasional dan internasional. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.38 Tahun 2002 tentang Daftar Kordinat Geografis Titik Pangkal Kepulauan Indonesia dan Peta Laut serta hasil survei titik dasar, PPKT yang berbatasan langsung dengan negara tetangga mencapai 92 pulau dan 12 pulau diantaranya perlu mendapat perhatian khusus sesuai yang dicantumkan dalam Perpres 78/2005.

Adapun penyebaran PPKT yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, yaitu dengan India 6 pulau, Malaysia 17 pulau, Singapura 4 pulau, Vietnam 3 Pulau, Filipina 13 pulau, Australia 27 pulau, Timor Leste 6 pulau, Palau 7 pulau, Papua New Gini 2 pulau dan Samudera Hindia 10 pulau.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, tindakan dalam pengembangan intrastuktur PUPR di PPTK adalah

**"Pengembangan infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari pulau-pulau itu sendiri. Kita akan mendukung pembangunan infrastruktur pulau terluar. Kedepan, untuk pulau terluar terutama yang berpenghuni, BPIW akan membuat masterplan," ujar Rido.**

untuk menjaga agar keberadaan PPTK tidak hilang akibat alam atau diklaim negara lain.

Selain itu, pengembangan potensi yang ada di kawasan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Dikatakannya juga bahwa upaya menjaga PPTK dilakukan agar wilayah negara tetap terjaga, tak ada sedikitpun wilayah negara yang hilang. "Pengembangan infrastruktur dilaksanakan sesuai

dengan kebutuhan dari pulau-pulau itu sendiri. Kita akan mendukung pembangunan infrastruktur pulau terluar. Kedepan, untuk pulau terluar terutama yang berpenghuni, BPIW akan membuat *masterplan*," ujar Rido.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW Kementerian PUPR, Hadi Suchayono menyatakan keberadaan pulau terluar di tanah air memiliki nilai strategis dan perlu mendapat perhatian khusus, karena memiliki tantangan yang lebih berat dibandingkan kawasan lainnya, dimana pada umumnya PPKT jauh dari pusat kegiatan, sehingga prasarana dan sarana seperti air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan, pasar, informasi dan komunikasi kondisinya masih belum



optimal.

Kemudian, tingkat kesejahteraan masyarakat PPKT pada umumnya relatif masih minim, sehingga menimbulkan kesenjangan dengan negara tetangga. Tak jarang, kesenjangan tersebut mendorong penduduk untuk berinteraksi dengan negara tetangga yang kondisinya lebih baik. Untuk itu diperlukan keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut.

Keterpaduan ini menyangkut beberapa hal, seperti perbaikan data-data PPKT. Menurut Hadi, keterpaduan dengan berbagai pihak diperlukan, untuk mengetahui secara pasti mengenai pulau yang perlu segera didukung. Untuk mendapatkan data yang pasti mengenai kondisi pulau-pulau terluar, terutama yang berpenghuni, menurut Hadi, BPIW akan melakukan koordinasi dengan instansi lain, khususnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Selain itu akan dilakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditempatkan di pulau-pulau terluar tersebut. Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten setempat, terutama terkait usulan program pembangunan infrastruktur. "Kita melihat usulan itu dari sisi kebutuhan masyarakat. Kalau bicara kebutuhan, maka dilihat juga jumlah penduduknya berapa, dan apakah

lokasinya strategis atau tidak. Kalau strategis bisa jadi prioritas untuk ditangani," ucap Hadi. Penanganan pulau terluar ini perlu mendapat perhatian serius, karena bila tidak ditangani dapat terancam tenggelam, terkena dampak perubahan iklim dan air laut yang semakin naik. Pada prinsipnya pembangunan pulau-pulau terluar, untuk menjaga keutuhan negara, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa, serta menciptakan stabilitas kawasan.

Disamping itu juga untuk pengamanan potensi sumber daya alam dan tentunya pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan PPKT juga dilakukan dengan membangun infrastruktur dasar bagi para penduduk yang tinggal di pulau itu, seperti perumahan dan permukiman berupa jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi. Pembangunan infrastruktur juga untuk mendukung peran aparat keamanan dengan membangun infrastruktur pendukung

---

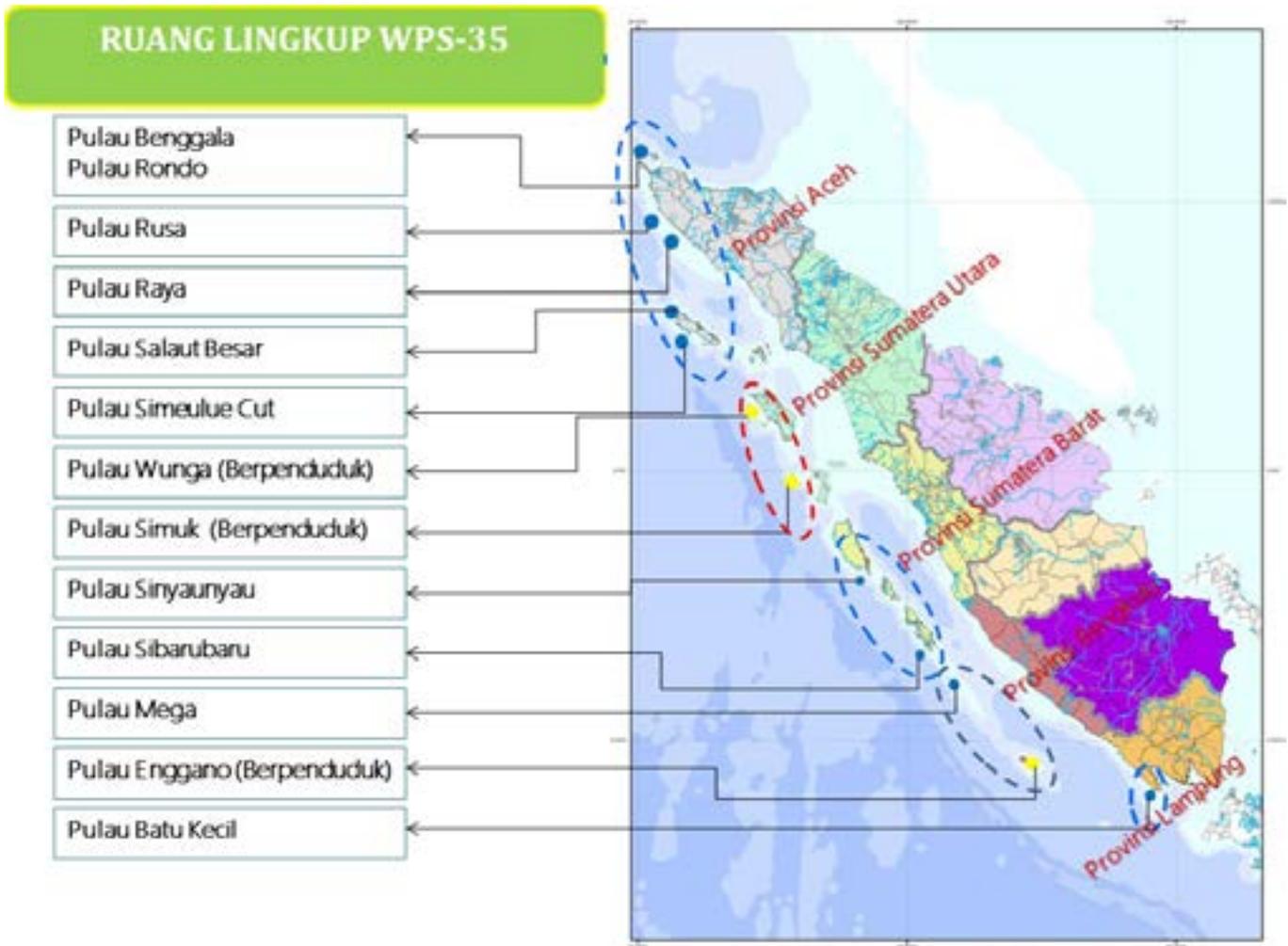
Untuk mendapatkan data yang pasti mengenai kondisi pulau-pulau terluar, terutama yang berpenghuni, menurut Hadi, BPIW akan melakukan koordinasi dengan instansi lain, khususnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

---

seperti pos keamanan.

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di pulau terluar, Kementerian PUPR juga memberikan dukungannya, terutama terkait infrastruktur bagi kegiatan nelayan, seperti dermaga kecil dan lokasi untuk tambatan perahu. PPKT tersebar pada 23 provinsi, yakni 23 pulau - Provinsi Kep. Riau, 19 pulau - Provinsi Maluku, 11 pulau - Provinsi





Sulawesi Utara, 9 pulau - Provinsi Papua, 7 pulau di Provinsi NAD dan NTT, 3 pulau tersebar di 7 Provinsi, 2 pulau tersebar di 3 Propinsi, 1 pulau tersebar di 6 Provinsi.

Adapun PPKT yang tersebar pada 18 WPS yaitu, 9 pulau di WPS Sibolga-Padang-Bengkulu, 6 pulau di WPS Batam-Tanjung Pinang, 5 pulau di WPS Sabang-Banda Aceh-Langsa, 4 pulau di WPS GorontaloKotamobago, 3 pulau di WPS Sorong-Manokwari, 2 pulau di WPS Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang, dan WPS Temajuk-Sebatik.

Selanjutnya, WPS MedanTebing Tinggi-Dumai-Pekan Baru, serta WPS Tanjung LesungSukabumi-Pangandaran-Cilacap.

Kemudian 1 pulau berada di WPS Malang-Surabaya-Bangkalan, WPS Tanjung-Mataram-Mandalika, WPS Waingapu-Labuan Bajo-Ende-Maumere, WPS Kupang-Atambua, WPS Bitung-Manado-

AmurangKotamobagu, WPS Jayapura-Merauke, WPS Merak-Bakauhuni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-api, serta Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi.

PPKT yang berada di NTT, seperti Pulau Alor. Kondisi pulau-pulau sangat kecil sekitar Pulau Alor perlu mendapatkan air bersih. Selama ini ada tiga pulau sangat kecil yang mendapatkan air bersihnya dari Pulau Alor. Tiga pulau tersebut berada di sebelah barat Pulau Alor. Beberapa infrastruktur yang dibangun di kawasan ini yakni sarana untuk mandi, cuci, Kakus (MCK) di sepanjang garis

pantai barat Kecamatan Alor Barat Laut. Dengan adanya rencana BPIW untuk memuat *masterplan* Pulau Terluar, maka pembangunan infrastruktur sektor PUPR dapat lebih dimaksimalkan. **Tim Redaksi**

Pembangunan PPKT juga dilakukan dengan membangun infrastruktur dasar bagi para penduduk yang tinggal di pulau itu, seperti perumahan dan permukiman berupa jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi.

# Evaluasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PUPR



**Ir. James Siahaan, MUM**

*Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program*

*Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR BPIW*

Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BPIW mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR).

Sedangkan fungsi Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR adalah koordinasi dan penyusunan sinkronisasi program pembangunan jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Kemudian juga dilakukan koordinasi dan penyusunan sinkronisasi serta penyusunan program tahunan pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Selain itu dilakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR dan pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Dengan tugas dan fungsi tersebut, maka dilakukan evaluasi keterpaduan pembangunan infrastruktur sektor PUPR. Evaluasi keterpaduan tersebut amanat dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian 2015-2019. Dalam Renstra tersebut terutama pada poin utama Sasaran Strategis 1 adalah meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan.

Dalam renstra itu disebutkan bahwa target keterpaduan sasaran output supaya terwujud keterpaduan infrastruktur dengan nilai di Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), dan di kawasan ada nilai pertahunnya

**Kita punya tugas untuk mengukur keterpaduannya, melalui metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Metode AHP merupakan suatu model untuk menentukan indikator dalam struktur yang sangat kompleks (ditentukan bobotnya).**

periode 2015 – 2019. Nilai keterpaduan suatu kawasan dianggap terpadu dengan batas minimal nilai keterpaduan kawasan adalah 78%, nilai keterpaduan WPS mencapai 78%,

dan nilai keterpaduan antar WPS 76%.

Kita punya tugas untuk mengukur keterpaduannya melalui metode *analytic hierarchy process* (AHP). Metode AHP merupakan suatu model untuk menentukan indikator dalam struktur yang sangat kompleks (ditentukan bobotnya).

Bila kita bicara mengenai mengukur keterpaduan, maka ada 3 pilihan :

1. Terpadu dalam rencana
2. Terpadu dalam program
3. Terpadu dalam pelaksanaan

Mengenai bobot penilaian terhadap 3 hal tersebut, maka secara subjektif dan melalui jajak pendapat dari para pengambil keputusan tertinggi di BPIW dan di balai, diputuskan bahwa :

- Bobot untuk keterpaduan perencanaan mencapai 53 %
  - Bobot sikronisasi program mencapai 32%
  - Bobot detil pelaksanaan mencapai 15%
- Secara detail indikator dalam keterpaduan



## Hasil pengukuran keterpaduan pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional dengan infrastruktur PUPR tahun 2016



Hasil Pengukuran Keterpaduan. Status 30 Oktober 2016

program ada 7 indikator. Ketujuh indikator itu yakni :

1. Jenis fungsi pengembangan
2. Dukungan fungsi terhadap infrastruktur
3. Kesesuaian Lokasi
4. Besaran biaya
5. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan
6. Volume / besaran misalnya : km dan m<sup>3</sup>
7. Kriteria kesiapan (readiness criteria)

Perencanaan program kegiatan pembangunan infrastruktur disuatu wilayah, harus diidentifikasi kesesuaiannya terhadap fungsi pengembangan sebuah kawasan.

Salah satu contoh yaitu jika kawasan tersebut dikembangkan untuk pariwisata, maka kegiatan – paket ini sesuai jenis pengembangan kawasan – kawasan. Secara

otomatis kondisi tersebut diberi nilai 3, yang merupakan nilai tertinggi.

**Bila ada ada kegiatan – paket dan pembangunan infrastruktur – air baku, maka kegiatan – paket ini harus di cek, apakah sesuai dengan fungsi pengembangan sebuah kawasan.**

Jika paket ini mendukung fungsi lain, juga diberi juga nilai 3. Dalam hal paket penyediaan air baku kegiatan ini, sangat mendukung fungsi lain di luar sektor Sumber

Daya Air (SDA) seperti Sistem Penyediaan Air Minum ((SPAM) Regional.

Pada tahun anggaran 2016, BPIW melalui Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah menghitung nilai keterpaduan masing – masing WPS dan kawasan.

Dengan mendapatkan keterpaduan nilai keterpaduan diatas, maka masing-masing unit organisasi atau unor dapat melihat keterpaduan infrastruktur PUPR di masing – masing WPS dan kawasan, sebagai acuan untuk lebih meningkatkan keterpaduan pada masa yang akan

datang, hingga mencapai nilai keterpaduan 100% sesuai tuntutan Renstra Kementerian 2015-2019.

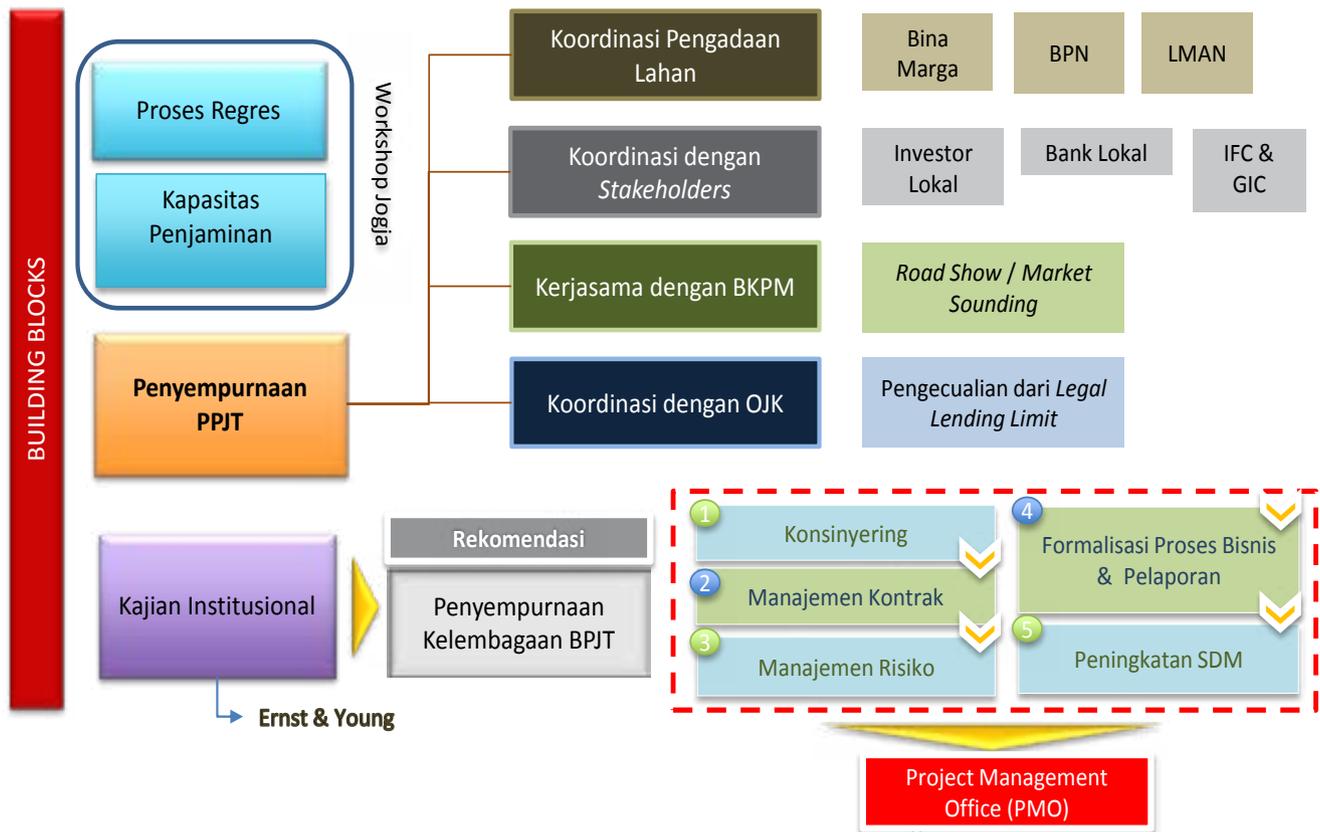
# Modernisasi Jaringan Jalan Melalui Pembangunan Jalan Tol Serta Peran PT PII Dalam Penjaminannya

Telah dijamin melalui PT PII

1. Jalan tol Semarang – Batang

Rencana penjaminan PT PII :

1. Jalan tol Samarinda – Balikpapan
2. Jalan tol Manado – Bitung
3. Jalan tol Malang – Pandaan



Berdasarkan estimasi kebutuhan pendanaan infrastruktur 2015 – 2019, Pemerintah hanya mampu memnuhi 30% dari total kebutuhan dana, sekitar 1.433 Triliun dari total 4.779 Triliun. Hampir 36% dari selisih pendanaan di penuhi skema PPP.

Sementara pihak swasta diharapkan dapat memenuhi selisih pendanaan, serta dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pembangunan, pelaksanaan, dan pengelolaan layanan infrastruktur yang berkualitas



Jika anda ingin liburan ke tempat wisata unik di Bali, sangat disarankan untuk mengunjungi salah satu pulau yang memiliki daya tarik wisata unik dan sangat mempesona, yakni Nusa Penida. Pulau tersebut merupakan sebuah pulau kecil yang berada di sebelah tenggara pulau Bali, dan dipisahkan oleh selat Badung. Pulau ini masuk dalam rencana pengembangan yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), tepatnya pada Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 15 Gilimanuk-Denpasar-Padang Bay.

Tak Jauh dari pulau ini, juga ada 2 pulau kecil lainnya, yaitu Pulau Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Ketiga pulau itu, masuk dalam wilayah pemerintahan kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Diantara ketiga pulau tersebut, Nusa Penida yang terbesar. Kata 'Penida' sendiri artinya adalah besar. Sedangkan pulau yang terkecil dari ketiganya adalah Nusa Ceningan. Khusus untuk Nusa Lembongan, merupakan pulau yang paling dikenal wisatawan mancanegara, terutama wisatawan dari Australia.

Kondisi Alam Pulau Nusa Penida terdiri dari daratan landai dan daratan perbukitan yang dikelilingi oleh lautan. Pulau ini sangat kering dan memiliki kandungan kapur yang tinggi. Mata pencaharian masyarakat lokal beragam, ada yang menjadi petani rumput laut, nelayan, dan ada juga memilih sebagai pedagang. Daya tarik wisata Nusa Penida terletak pada pantai pasir putih, konservasi

### *Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang berada di sebelah tenggara pulau Bali, dipisahkan oleh selat Badung*

tumbuhan langka, konservasi burung langka seperti burung Jalak Bali, dan konservasi penyu hijau. Lokasi konservasi penyu hijau di daerah ini, sangat mirip dengan konservasi penyu hijau di Tanjung Benoa Bali. Dengan memiliki laut yang indah, para wisatawan sangat menyukai melakukan aktivitas berupa menyelam (*scuba diving*) dan *snorkeling*. Lokasi *scuba diving* dan *snorkeling* dikelilingi lautan lepas, sehingga area untuk melakukan dua hal itu sangat luas sekali. Tempat ini

juga memiliki biota laut yang masih alami dan terjaga, seperti terumbu karang dan ikan langka Mola – Mola, sehingga sangat memanjakan mata para wisatawan. Adapun tempat favorit wisatawan melakukan *scuba diving* dan *snorkeling* ini adalah Malibu Point, Penida Bay, Toyapakeh, Manta Point, Batu Meling, Batu Abah, dan Batu lumbang.

Selain aktivitas wisata bahari, pulau ini juga terkenal akan tempat wisata eksotis dan unik terutama tempat wisata pantai pasir putih. Meski sangat indah, namun para wisatawan jarang mengunjunginya, karena untuk saat ini akses jalan ke pantai belum memadai. Untuk menikmati keindahan pulau Nusa Penida, anda dapat berangkat dari Pulau Bali. Cara terbaik dan murah ke Pulau Nusa Penida adalah melewati jalur laut. Ada beberapa tempat di Bali yang memiliki rute keberangkatan dari Bali ke pulau nusa Penida menggunakan perahu antara lain:

- Pelabuhan Padang Bai, menggunakan kapal ferry besar (kapal Roro Nusa Jaya abadi) yang dapat mengangkut kendaraan anda. Dengan waktu perjalanan selama 1 jam dan kapal akan



# Indahnya Wisata Bahari di Pulau Nusa Penida

- berlabuh di pelabuhan utama Penida.
- Pelabuhan di pantai Kusamba Klungkung, menggunakan perahu tradisional jenis sampan, dengan durasi perjalanan selama 1 jam dan sampan akan berlabuh di pelabuhan Toya Pakeh.
- Pelabuhan pantai Sanur, ada pilihan menggunakan fast boat serta pilihan menggunakan sampan.
- Pelabuhan Benoa, menggunakan kapal *Quick Silver*.

Sesampainya anda di Nusa Penida, sangat disarankan untuk menyewa sepeda motor untuk berkeliling. Sewa motor banyak tersedia di dekat pelabuhan dengan harga sewa sepeda motor mulai dari Rp 70.000 hingga Rp 120.000. Sangat disarankan untuk menginap di pulau tersebut, dikarenakan akses yang cukup jauh dari satu tempat wisata ke tempat wisata lainnya dan *boat* terakhir kembali ke Bali hanya tersedia sampai jam 3 sore.

Kegiatan lain yang dapat dilakukan di Nusa Penida seperti menikmati segarnya Mata air Tembeling yang terletak kurang lebih 35 kilometer dari pelabuhan. Kemudian, pemandangan laut lepas yang ada di di Angel's Billabong merupakan muara akhir

dari sebuah sungai di Nusa Penida, dimana bermuara terlebih dahulu sebelum air sungai tersebut sampai ke lautan lepas. Angel's Billabong ini permukaan airnya sangat tenang dan jernih. Selain itu terdapat pula cerukan-cerukan yang membentuk kolam secara alami yang sangat indah dan cantik. Mungkin tempat seperti ini belum tentu dapat ditemukan di tempat lain.

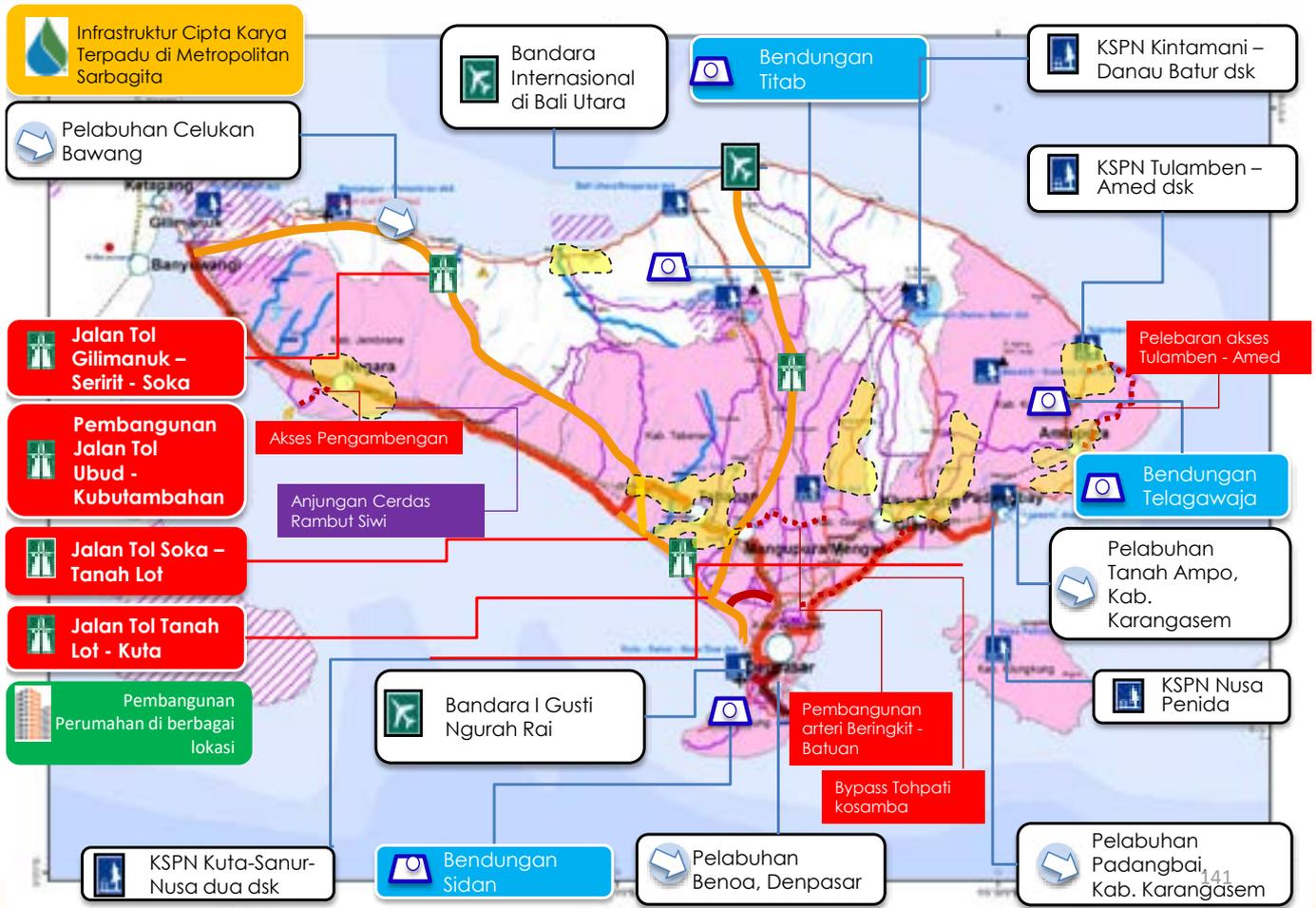
Aktivitas yang bisa dilakukan saat berlibur ke nusa Penida adalah Ikan Pari Manta dan berenang bebas di Pantai Pasih Uug atau para wisatawan asing sering menyebutnya sebagai *Broken Beach*. Disebut demikian oleh karena pantai ini memiliki sebuah tebing yang berlubang pada bagian tegahnya dengan ketinggian 50-200 meter, sehingga membentuk seperti sebuah terowongan raksasa yang berada di tengah laut. Dengan keindahan alam yang mempesona, maka Pulau Nusa Penida menjadi pilihan yang tepat untuk berlibur. **(Inl/InfoBPIW)**



Sumber: Dok.BPIW

# Wilayah Pengembangan Strategis 15 Gilimanuk - Denpasar - Padang Bay

## ULTIMATE WPS 15 GILIMANUK – DENPASAR – PADANG BAY TAHUN 2025



### Ultimate

Arah Pembangunan infrastruktur PUPR sampai dengan tahun 2025 di WPS 15 Gilimanuk-Denpasar-Padang Bay- diantaranya adalah pembangunan jalan tol diantaranya Jalan tol gilimanuk-Seririt-Soka, Jalan Tol Ubud-Kubutambahan-Jalan tol soka-Tanah Lot, Jalan tol tanah lot-Kut. Selain Jalan, arah pengembangan infrastruktur PUPR di WPS 15 ini diantaranya Pembangunan bendungan Titab, bendungan Telagawaja, Bendungan sidan. Serta pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan juga bandara Internasional di Bali Utara. Untuk Kawasan strategis Pembangunan Nasional diantaranya KSPN Kintamani-Danau Batur dsk, KSPN Tulamben-Amed dsk, KSPN Nusa Penida, KSPN Kuta-Sanur-Nusa dua dsk. Untuk Pembangunan Pelabuhan di WPS 15 ini diantaranya Pelabuhan Celukan Bawang, Pelabuhan Tanah ampo, Kab Karangasem,

Pelabuhan Benoa Denpasar, dan juga Pelabuhan Padangbai Kab Karangasem. Selain itu di WPS 15 ini dibangunnya arteri beringkit batuan dan juga bypass tohpati kosamba dan adanya pelebaran Tulamben-amed.

### Program Utama 2017

Pada program utama WPS 13 Malang-Surabaya-Bangkalan- Sampai dengan tahun 2017, infrastruktur PUPR yang dibangun difokuskan pada pembangunan jalan, diantaranya adalah pembangunan Jalan Tol Mojokerto menuju surabaya, pembangunan jalan tol Surabaya menuju pasuruan, Selain itu ada juga pembangunan Embung Sanganam kabupaten pasuruan, pembangunan embung cangkerman, dan dibangunnya IPLT Kota Batu.

# Wilayah Pengembangan Strategis 16

## Tanjung – Mataram - Mandalika

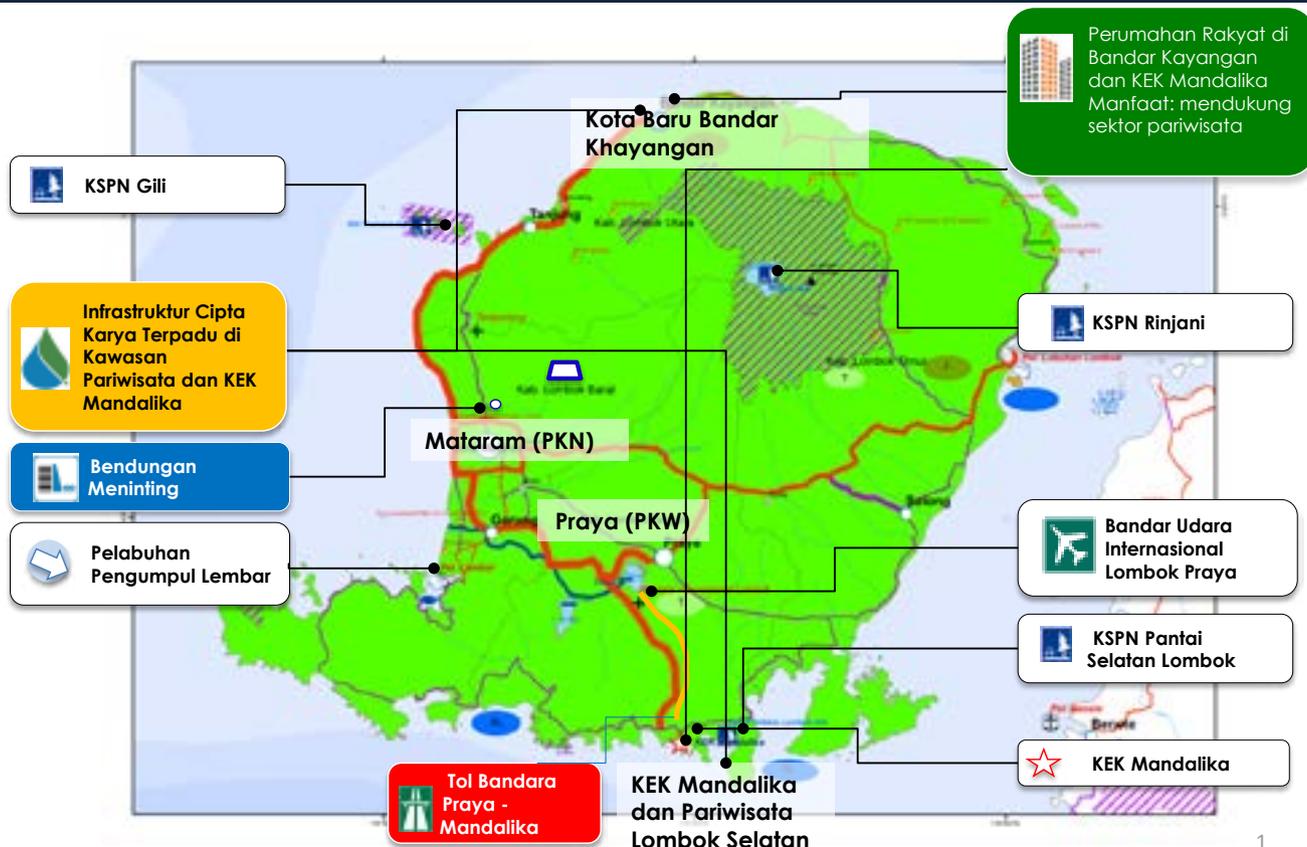
### Ultimate WPS 16

Arah pembangunan pada Wilayah Pengembangan Strategis Tanjung – Mataram - Mandalika (WPS 16) adalah pembangunan infrastruktur yang mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang berada pada WPS 16, mendukung akses menuju Bandar Udara Internasional Lombok Praya yang berupa pembangunan Jalan Tol Bandara Praya – Mandalika. Adapun KSPN yang terdapat pada WPS 16 adalah KSPN Gili, KSPN Rinjani dan KSPN Pantai Selatan Lombok. Terdapat pembangunan Bendungan Meninting di PKN Mataram dan pembangunan perumahan rakyat di Bandar Kayangan sebagai bentuk dukungan pengembangan Kota Baru Bandar Khayangan. Selain infrastruktur yang mendukung beberapa KSPN di WPS 16, arah pembangunan di WPS 16 ini juga mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Mandalika.

### Program Utama WPS 14

Program utama pada Wilayah Pengembangan Strategis Tanjung – Mataram - Mandalika (WPS 16) adalah dari sektor Sumber Daya Air pembangunan pengaman Pantai Ampenan di Kota Mataram, pembangunan Bendungan Meninting di Lombok Tengah dan pembangunan pengaman Pantai Batu Nampar di Lombok Timur. Dari sektor Bina Marga, terdapat pembangunan pelebaran jalan Pamenang – Bayan sepanjang 10 km di Lombok Utara dan pembangunan jalan Bayan – Sanbelia – Lb. Lombok. Dalam sektor Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melakukan penataan kawasan KEK Mandalika dan sekitarnya serta pembangunan sarana prasarana TPS dan SPAM di kawasan pariwisata dan Kota Mataram. Terkait dengan sektor Penyediaan Perumahan, terdapat pembangunan rusunawa Kawasan Praya Barat dan Praya Timur.

## ULTIMATE WPS 16 TANJUNG-MATARAM-MANDALIKA 2025



# INOVASI SKEMA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan sebuah negara dalam membawa masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Untuk memperbaiki sektor ekonomi negeri ini, Presiden Jokowi menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun anggaran 2018 mencapai di atas 6%. Mendukung target tersebut, salah satu sektor yang harus dipersiapkan dengan matang adalah infrastruktur. Segala upaya dalam membenahi kondisi infrastruktur disinyalir memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan pendapatan, dan untuk jangka panjangnya akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia.

Identifikasi terhadap program pembangunan infrastruktur di beberapa negara menyimpulkan bahwa pada umumnya program ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan

kebutuhan dasar dan konektivitas, mulai dari air, listrik, energi, hingga transportasi (jalan raya,

kereta api, pelabuhan, dan bandara). Terkait dengan pembangunan yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR, bisa ditilik betapa pentingnya infrastruktur ke-PUPR-an dalam mendukung perekonomian Indonesia. Pertama, dan yang paling berdampak terhadap perekonomian adalah infrastruktur jalan. Bisa dibayangkan berapa kerugian yang akan dirasakan oleh para pengusaha apabila proses distribusi barang terhambat oleh rusaknya jalan. Kedua, infrastruktur keciptakaryaannya juga tak kalah krusial dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ketiga, infrastruktur pengairan. Sebagai salah satu sumber kehidupan, dibutuhkan infrastruktur yang handal agar bisa menghantarkan air untuk mengairi sawah-sawah, menjadi air baku untuk keperluan air minum dan sanitasi, kelangsungan industri, bahkan sebagai sumber energi terbarukan.

Pekerjaan rumah pemerintah sangat banyak dalam memperbaiki infrastruktur negeri ini. Namun di sisi yang lain, kita juga harus menyadari sumber daya yang dimiliki, terutama pendanaan APBN juga terbatas. Dibutuhkan sebuah inovasi dalam membiayai infrastruktur. Salah satunya dengan menggelorakan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta, atau yang biasa disebut Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Beberapa studi kasus hasil kajian yang dilakukan Badan Litbang PUPR akan diulas dalam artikel ini.

Skema KPBU sebenarnya bukan barang baru. Namun di Indonesia, pelaksanaannya masih jauh dari memuaskan. Menengok sedikit ke negara tetangga Malaysia yang telah melaksanakan skema KPBU hingga ratusan kali, sedangkan kita baru mencapai angka 40 saja. Menjelang tahun 2017 seharusnya KPBU sudah bukan menjadi hal yang langka lagi. Seharusnya segala proses administrasi penyiapan KPBU telah rampung pada tahun 2017 dan tinggal memasuki fase konstruksi saja. Sesungguhnya, mulusnya skema KPBU bisa memiliki banyak efek positif, misalnya peningkatan penyerapan tenaga kerja karena semakin lebarnya lapangan kerja. Selain itu kepercayaan perbankan dalam mendanai proyek-proyek KPBU juga akan meningkat, sehingga akan





Mulusnya skema KPBU bisa memiliki banyak efek positif, misalnya peningkatan penyerapan tenaga kerja karena semakin lebarnya lapangan kerja. Selain itu kepercayaan perbankan dalam mendanai proyek-proyek KPBU juga akan meningkat, sehingga akan semakin banyak lagi proyek-proyek dengan skema serupa di masa yang akan datang.

semakin banyak lagi proyek-proyek dengan skema serupa di masa yang akan datang.

#### Strategi Akselerasi Proyek KPBU

Teknologi memang sangat identik dengan wujud nyata berupa bangunan atau benda yang kasat mata. Namun bila kita melihat dengan kaca mata lain, sebuah kebijakan pun bisa dikatakan teknologi karena di dalamnya memuat pemikiran-pemikiran yang bersifat inovatif. Soft technology. Ya, mungkin itu kata yang dapat mewakilinya. Dalam mendukung terlaksananya skema KPBU dalam pembiayaan infrastruktur, berikut diilustrasikan 1 (satu) contoh yang sudah dilaksanakan Balitbang PUPR melalui Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT) dengan mengambil studi kasus pada Rencana Pembangunan Pumped Storage Power Plant (PSP) Jatiluhur.

Rencana pembangunan PSP Jatiluhur menjadi salah satu isu utama yang mendapat perhatian Kementerian PUPR. Dengan memanfaatkan Jatiluhur menjadi lower reservoir dan Cirata sebagai upper reservoir, proyek ini berpotensi menghasilkan energi sebesar 660 MW. Untuk mengakselerasi pembangunan proyek ini, Balitbang PUPR melalui PKPT menawarkan beberapa rekomendasi kebijakan untuk pelaksanaan proyek yang direncanakan menggunakan skema KPBU ini :

- Agar proses *financial closing* tidak memakan waktu lama, diusulkan pembebasan lahan menjadi tanggungjawab Pemerintah. Meskipun beban bunga (*interest during construction/IDC*) baru diperhitungkan setelah *financial close*, tetapi semakin lama *Commercial Operation Date (COD)* semakin lama pula proyek tersebut bisa fungsional. Berbekal *lessons learned* proyek PLTU Batang 2 x 1.000 MW yang dilaksanakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), didapati bahwa

*financial closing* membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 5 (lima) tahun. *Power Purchasing Agreement/PPA signing* pada tahun 2011, sedangkan *financial closure* tahun 2016. Hal tersebut karena terkendala pembebasan lahan. Dalam kontrak disebutkan bahwa Badan Usaha pemenang tender dibebani tanggung jawab pembebasan lahan seluas 300-400 hektar.

- Selain itu, Badan Penyiapan KPBU (jika proyeknya termasuk kategori *solicited*) harus mampu memitigasi risiko yang berpotensi muncul, terutama terkait kemungkinan perubahan regulasi di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi jika pergantian kepada daerah berdampak pada keberlangsungan proyek KPBU.

- Dan terakhir, Kementerian PUPR perlu membentuk Unit Khusus sebagaimana Divisi-divisi di PLN yang bertugas “mengawal” pelaksanaan setiap fase proyek KPBU (lihat Gambar 1). Jika saat ini telah dibentuk Simpul KPBU (atau biasa disebut PPP Center) melalui Kepmen PUPR No. 691.2/KPTS/M/2016, maka disarankan agar lembaga ini memperkuat diri dengan fungsi-fungsi tersebut; selain untuk mengawal jalannya proyek KPBU, PPP Center ini juga bisa menjadi *learning center*, memediasi antara calon-calon Badan Usaha/Investor, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Badan Usaha Penjamin (PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur).

## Kegiatan Publikasi BPIW

Berikut adalah beberapa dokumentasi dari serangkaian kegiatan-kegiatan publikasi yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah selama Bulan November 2016



Kepala BPIW, Rido Matari menjelaskan WPS kepada salah satu pengunjung pameran Konstruksi Indonesia 2016



Kepala BPIW beserta jajaran berfoto bersama di depan Booth BPIW dalam pameran Konstruksi Indonesia



Kepala BPIW menyampaikan Pengembangan Palembang Raya di RRI 1



Kepala BPIW menjawab pertanyaan media terkait pengembangan Palembang Raya

## Kunjungan Kepala BPIW ke Ternate

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate terus meningkatkan kegiatan Barifola atau gotong royong bedah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)



Kepala BPIW beserta jajaran befoto bersama pekerja Barifola di Ternate



Walikota Ternate bersama Kepala BPIW meninjau proyek pembangunan pengamanan pesisir pantai di Ternate



Foto bersama di depan Cagar Budaya Benteng Oren di Ternate



Peninjauan bangunan Cagar Budaya Benteng Oren di Ternate

# TIPS MENABUNG BAGI PEGAWAI



Untuk dapat membeli sesuatu tentunya kita harus pandai-pandai menabung, pintar-pintar menabung tidaklah gampang apa yang telah kita rencanakan. Banyak hal atau banyak strategi, agar uang kita dapat terkumpul. Berprofesi sebagai karyawan bisa menjadi target pemasaran para pengusaha yang terus merayu dengan bermacam promosi agar segera membelanjakan setiap uang yang masuk ke kantong. Bagaimana caranya agar kita dapat menabung? Berikut ini ada beberapa tips menabung bagi karyawan agar bisa menabung:

## 1. Langsung Menyisihkan saat mendapat penghasilan

Akan lebih ringan jika menyetorkan saat sedang mendapatkan, saat itu juga kita bisa menyetorkan sebagian untuk menabung, menyetorkan 2,5% untuk

zakat, dan sisanya untuk keperluan lain.

## 2. Menabung tanpa perlu menunggu ada nominal besar

Tidak perlu malu datang ke bank untuk mengantri panjang tetapi yang disetor hanya sedikit, lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali, apalagi sekarang ini banyak perbankan yang memberikan produk tabungan rencana mandiri dimana tabungan kita secara otomatis terpotong setiap bulan dan dapat diambil setelah jangka waktu tertentu

## 3. Buka lebih dari 2 buku tabungan rekening Bank

Jadi kita bisa menentukan untuk apa kegunaan masing-masing rekening tersebut, contohnya rekening yang ini bisa diambil sewaktu-waktu, rekening yang satunya khusus untuk tabungan, jika perlu kartu ATM disimpan di tempat yang tidak dapat dijangkau

## 4. Menabung minimal 10% dari penghasilan

Misalnya Gaji kita Rp 3.000.000,- per bulan, maka kita bisa mewajibkan pada diri sendiri untuk menabung Rp. 300.000,- setiap bulan

## 5. Investasi dalam bentuk ilmu atau pendidikan

Teruslah belajar meskipun sudah menjadi pekerja, pergunkan sebagian gaji untuk keperluan pendidikan, kita bisa kuliah ekstensi, ingat pepatah 'dengan ilmu maka hidup menjadi mudah', ya... setidaknya dikemudian hari karir kita akan meningkat sehingga penghasilan naik

## 6. Tabung dalam bentuk emas atau properti

Usahakan menukar uang kita kedalam bentuk emas, atau jika uangnya banyak maka bisa digunakan untuk membeli properti entah itu tanah, rumah, toko, atau yang lainnya, karena nilai tukar emas itu terbukti stabil, sedangkan harga properti terus meningkat.

# Pengembangan Kawasan Sungai Musi, Perlu Didukung Kementerian PUPR

**Prof. Ir. Subriyer Nasir, MS., Ph.D**

Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya,

Kota Palembang, merupakan salah satu kota yang di Indonesia yang akan dijadikan Metropolitan Baru, yang disebut Palembang Raya. Metropolitan baru ini merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Kawasan Metropolitan Baru tersebut mencakup Kota Palembang, sebagian Kabupaten Banyu Asin, sebagian Kabupaten Ogan Ilir, dan sebagian Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kota Palembang juga dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Konsep pengembangan Metropolitan Palembang Raya dititikberatkan pada pengembangan dua kota inti dengan fungsi yang berbeda, dimana Tanjung Api-Api untuk pengembangan industri, dan Kota Palembang sebagai pengembangan perdagangan dan jasa. Kemudian pengembangan kota-kota satelit yang mandiri dengan fungsi berbeda-beda. Kota Palembang berperan sebagai kota inti yang merupakan pusat perdagangan dan Jasa Skala Nasional.

Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, Prof. Ir. Subriyer Nasir, MS., Ph.D menilai pembangunan infrastruktur di Palembang dan sekitarnya selama ini cukup pesat. Dengan menjadi metropolitan baru, maka Subriyer meyakini, seluruh kawasan akan semakin berkembang dengan baik. Namun menurutnya, selama ini pembangunan infrastruktur hanya terfokus di daratan. Padahal Palembang dan daerah-daerah di sekitarnya, dikelilingi oleh sungai Musi. Keberadaan sungai Musi sangat mempersingkat jarak, satu tempat ke tempat lain. Subriyer mencontohkan, bila dari Kota Palembang menuju kawasan Seberang Ulu melalui sungai dapat ditempuh hanya dalam waktu 7 menit. Bila melalui jembatan Ampera, maka akan memakan waktu setengah hingga 1 jam perjalanan dengan kendaraan.

"Kita punya potensi sungai, yang bila dikembangkan, maka saya kira sejalan dengan pengembangan wilayah. Saya berharap Kementerian PUPR dapat mendukung daerah aliran sungai terutama di Sungai Musi. Apalagi banyak masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai dan juga sekitar rawa-rawa, yang perlu diperhatikan permukimannya," ujar Subriyer, saat ditemui di ruang kerjanya, di Palembang, belum lama ini.

Subriyer juga meminta Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dapat membuat perencanaan yang diarahkan pada pengembangan kawasan sekitar sungai, terutama di sepanjang sungai Musi. "BPIW sebagai badan yang mengatur rencana pengembangan wilayah untuk sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, harus mengarahkan program pembangunan infrastruktur pada pengembangan kawasan sekitar sungai, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,

"tegasnya. Dengan revitalisasi sungai Musi, Subriyer meyakini akan memperkuat posisi Palembang Raya sebagai Kota Metropolitan baru di Indonesia. **Hendra Djamal**

Saya berharap Kementerian PUPR dapat mendukung daerah aliran sungai terutama di Sungai Musi. Apalagi banyak masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai dan juga sekitar rawa-rawa



